

**ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA INFLASI DENGAN KURS RUPIAH
TERHADAP DOLLAR AMERIKA SERIKAT TAHUN 1983. I-2000. IV
(PENERAPAN METODE KAUSALITAS GRANGER DAN SIMS)**

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh

Asal:	Halaman	Klass
	1	322.41
Terima Tgl :	28 FEB 2002	WB
No. Induk :	0401	a
KLA IR / PENYALIN :		

Ari Wibawanti
NIM, DIA195086

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2002**

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA INFLASI
DENGAN KURS RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA SERIKAT
TAHUN 1983.I - 2000.IV.
(PENERAPAN METODE KAUSALITAS GRANGER DAN SIMS)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : ARI WIBAWANTI

N. I. M. : DIAI95086

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

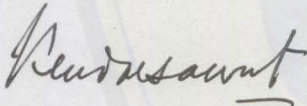
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

2 FEBRUARI 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Dra. Ken Darsawarti, MM
NIP. 130 531 975

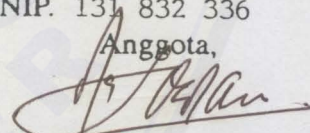


Sekretaris,



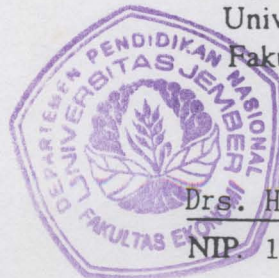
Drs. Zainuri, M.Si
NIP. 131 832 336

Anggota,



Drs. Bambang Yudono, MM
NIP. 130 355 405

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Drs. H. Liakip, SU
NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hubungan Kausalitas Antara Inflasi dengan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat Tahun 1983.I – 2000.IV

Penerapan Metode Kausalitas Granger dan Sims

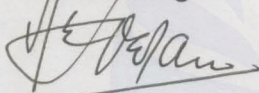
Nama Mahasiswa : Ari Wibawanti

NIM : D1A1-95086

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

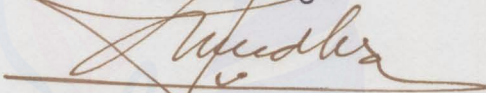
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Pembimbing I



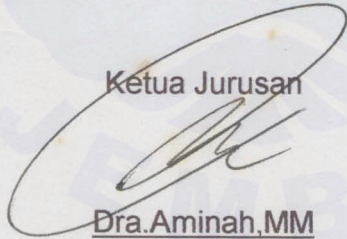
Drs. Bambang Yudono, MM
NIP:130355405

Pembimbing II



Drs. H. Achmad Qosyim, MP
NIP: 130937192

Ketua Jurusan



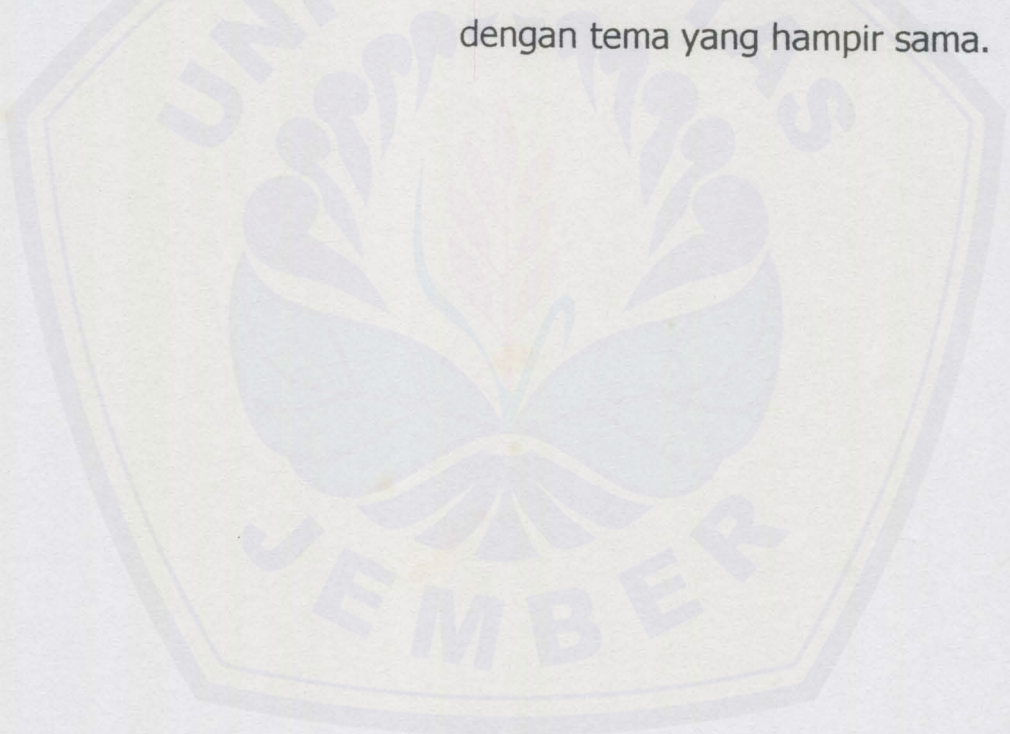
Dra. Aminah, MM
NIP:130676291

Tanggal Persetujuan: 8 Januari 2002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibuku yang selama ini selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menghadapi segala hal, serta suami dan anakku yang sangat kucintai. Tidak luput juga, semoga karya tulis ini berguna bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian dengan tema yang hampir sama.



MOTTO

“ Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
Dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” (**Al – Baqarah : 45**).

“ Orang yang mempunyai pengetahuan tertinggi adalah seseorang yang yang gigih melaksanakan ketetapan hati, membangun diri menjadi manusia utuh, membentuk kualitas batin, karakter dan kepribadiannya menjadi satu struktur karakter berharga, yang akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, serta membantu menjadikan dunia ini tempat kehidupan yang lebih baik.”

(**Kazuo Inamori**)

ABSTRAKSI

Analisis Hubungan Kausalitas Antara Inflasi dengan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat Tahun 1983.I – 2000.IV : Penerapan Metode Kausalitas Granger dan Sims

Oleh:
Ari Wibawanti

Drs. Bambang Yudono, MM
Drs. H.Achmad Qosyim,MP

Pembimbing I
Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas atau timbal balik antara variabel ekonomi inflasi (INF) dengan kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (EXR). Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang diperoleh dari data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), *International Financial Statistics-International Monetary Fund* (IMF), Buletin Ekonomi Moneter Bank Indonesia dan semua literatur yang mendukung.

Data yang digunakan dalam penelitian empiris ini merupakan data runtun waktu kuartalan dari tahun 1983.I sampai dengan 2000.IV atau dilakukan sebanyak 32 pengamatan. Apabila tidak tersedia data kuartalan maka dilakukan metode interpolasi linier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kausalitas Granger dan metode kausalitas Sims.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan metode kausalitas Granger antara variabel inflasi dengan variabel kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mempunyai hubungan dua arah atau timbal balik. Metode kausalitas Sims menunjukkan bahwa antara variabel inflasi dengan variabel kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mempunyai hubungan saling bebas atau tidak berpengaruh antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat jelas bahwa arah kebijakan pemerintah dalam upaya stabilisasi kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat perlu mendapatkan prioritas agar angka inflasi dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan perekonomian nasional berjalan lebih kondusif.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hubungan Kausalitas Antara Inflasi dengan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat: *Penerapan Metode Kausalitas Granger dan Sims*.”

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak hingga kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Yudono,MM sebagai pembimbing I dan Bapak Drs.H.Achmad Qosyim,MP sebagai pembimbing II atas saran, komentar dan kesediaannya membaca tiap kata dari awal penulisan proposal hingga skripsi;
2. Bapak Drs. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi-Universitas Jember serta Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberi ilmu kepada penulis;
3. Prof.Dr.Kabul Santoso,M.Sc selaku Rektor Universitas Jember yang telah memimpin dan mengarahkan laju Universitas Jember dimana penulis berada dalam ruang lingkungannya;
4. Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Staf Perpustakaan Universitas Jember yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur dan data-data guna memperlancar penulisan skripsi ini;
6. Segenap keluarga yang sangat berarti dalam hidupku Bapak Didik S dan Ibu Pudji Astutik tercinta serta suamiku yang selalu memberi kasih sayang, do'a restu, dan dorongan yang tulus.

Saya berharap, karya tulis ini bisa memberikan manfaat yang diharapkan oleh para pembacanya.

Jember, Januari 2002

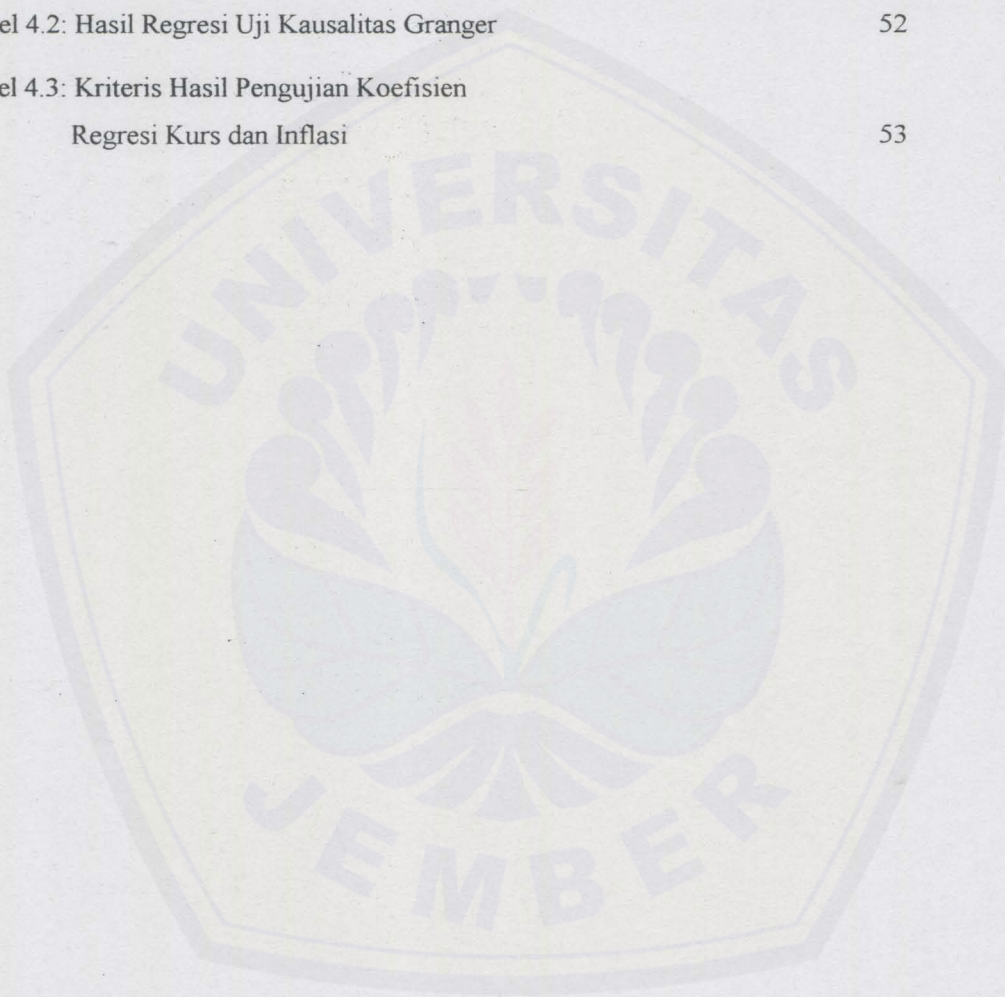
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	7
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1 Teori Inflasi	10
2.2.2 Teori Nilai Tukar (Kurs).....	18
2.3 Hipotesis	28
III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Rancangan Penelitian.....	30
3.2 Jenis dan Sumber Data	30
3.3 Metode Analisis Data	31
3.3.1 Uji Kausalitas Granger.....	31
3.3.2 Uji Kausalitas Sims	33
3.3.3 Uji Statistik.....	34
3.4 Definisi Variabel Operasional	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum	37

4.1.1	Perkembangan Inflasi di Indonesia.....	37
4.1.2	Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat.....	42
4.1.3	Sistem Nilai Tukar yang Pernah Diterapkan di Indonesia	45
4.2	Analisis Data	47
4.2.1	Analisis Kausalitas Granger	47
4.2.2	Analisis Kausalitas Sims	48
4.3	Pembahasan	49
4.3.1	Hasil Analisis Uji Kausalitas Granger.....	49
4.3.2	Hasil Analisis Uji Kausalitas Sims	54
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA.....	59
	LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1: Hasil Regresi Uji Kausalitas Granger	51
Tabel 4.2: Hasil Regresi Uji Kausalitas Granger	52
Tabel 4.3: Kriteria Hasil Pengujian Koefisien Regresi Kurs dan Inflasi	53



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Inflationary Gap	11
Gambar 2.2: Demand Pull Inflation	12
Gambar 2.3: Cost Push Inflation	14
Gambar 2.4: Pergeseran Kurva Agregate Demand	17
Gambar 2.5: Pergeseran Permintaan dan Penawaran Dollar Amerika Serikat	24
Gambar 2.6: Nilai Tukar Tetap dan Fleksibel	25
Gambar 2.7: Pasar Valuta Asing	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Data Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat (EXR) dan Inflasi (CPI) Tahun 1983.1-2000.4
- Lampiran 2: Grafik Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat (EXR) Tahun 1983.1-2000.4
- Lampiran 3: Grafik Inflasi (CPI) Tahun 1983.1-2000.4
- Lampiran 4: Uji Kausalitas Granger Lag 8: CPI Terhadap EXR
- Lampiran 5: Uji Kausalitas Granger Lag 4: CPI Terhadap EXR
- Lampiran 6: Uji Kausalitas Granger Lag 8: EXR Terhadap CPI
- Lampiran 7: Uji Kausalitas Granger Lag 4: EXR Terhadap CPI
- Lampiran 8: Uji Kausalitas Sims: LEXRT Terhadap CPIT
- Lampiran 9: Uji Kausalitas Sims: CPIT Terhadap LEXRT
- Lampiran 10: Uji Koefisien (*Wald Test*)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semakin menyatunya perekonomian nasional kedalam tatanan ekonomi dunia, maka iklim ketidakpastian yang menjadi ciri dalam dinamika perekonomian global pun harus dihadapi oleh semua negara di dunia tidak terkecuali negara Indonesia. Iklim ketidakpastian tersebut terutama yang berkaitan dengan perubahan pada nilai tukar sebagian akan tercermin sebagai ketidakpastian perubahan harga-harga barang dalam masyarakat. Ketidakpastian harga dalam jangka panjang akan menyulitkan perilaku ekonomi domestik maupun internasional untuk melakukan perencanaan kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Masalah ketidakpastian harga merupakan masalah ekonomi yang tidak pernah selesai sebagai bahan kajian para ekonom disamping masalah mendasar lainnya seperti pengangguran dan defisit neraca berjalan. Keberadaan inflasi membawa dampak pada perekonomian yang sedang dibangun mengalami hambatan dan bahkan dapat menghancurkan pembangunan ekonomi yang telah dilalui. Namun demikian adakalanya tingkat inflasi yang terekspektasi diperlukan untuk merespon para produsen meningkatkan produksinya dengan lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut tersirat makna bahwa diperlukan suatu manajemen makro ekonomi yang *solid* untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan yang sedang dilaksanakan (Wardhono,A dan Lestari,M,1998:12).

Inflasi dalam arti luas disadari memang bukan hanya masalah ekonomi, akan tetapi terkait juga dengan masalah sosio-ekonomi-politis. Ilmu ekonomi membantu kita untuk mengidentifikasi sebab-sebab inflasi diantaranya akibat pemerintah mencetak uang terlalu banyak (Boediono,1988:23). Ahli ekonomi biasanya lebih memusatkan perhatian pada faktor-faktor ekonomis obyektif karena merupakan bidang kompetensinya dan faktor-faktor tersebut berlaku umum bagi semua negara dengan tata sosial politis berbeda (Senopati,1995).

Perdebatan inflasi dari aspek teoritis tercermin antara mashab Klasik dan mashab Keynes. Hal tersebut secara tidak langsung merefleksikan pentingnya posisi inflasi dalam paradigma ekonomi empiris dan teoritis.

Para pemikir Klasik menyatakan bahwa inflasi dimanapun dan kapanpun merupakan fenomena moneter. Pemikiran awal mereka tertuang dalam *The Crude Quantity Theory* yang menyatakan bahwa dalam kondisi *full equilibrium* perubahan moneter hanya akan berpengaruh pada tingkat harga. Dengan demikian perubahan dalam jumlah uang beredar sebagai wujud dari kebijakan moneter hanya akan mengubah perekonomian secara nominal. Namun disisi lain kaum Keynes menyatakan bahwa perubahan moneter dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan sekaligus tingkat harga melalui tingkat bunga dan inflasi. Perubahan variabel moneter berupa perubahan jumlah uang yang beredar akan berpengaruh terhadap tingkat bunga. Selanjutnya melalui mekanisme perubahan harga akan mempengaruhi pendapatan nasional sebagai wujud perekonomian sektor riil (Nusantara, 1999:17).

Dari sisi domestik laju inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait yaitu ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi, jumlah likuiditas yang beredar dalam perekonomian, tingkat penggunaan kapasitas usaha dan faktor musiman. Kaitannya dengan nilai tukar tekanan domestik pada inflasi dapat pula disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi domestik sebagai akibat dari depresiasi dan gejolak pada nilai tukar. Bahkan inefisiensi dan ketidakseimbangan pada struktur fundamental mikro ekonomi, khususnya di sektor-sektor yang erat kaitannya dengan produksi dan distribusi dapat memperdalam dan memperpanjang tekanan pada laju inflasi terutama jika terjadi gejolak berkelanjutan pada faktor eksternal (khususnya nilai tukar) (Santoso dan Anglingkusumo, 1998:60). Semua hal tersebut mencerminkan kompleksitas dalam pengendalian dan stabilisasi laju inflasi melalui kebijakan moneter yang menjadi tugas pokok otoritas moneter. Sehingga secara teknis dalam hubungannya dengan kebijakan moneter, Bank Indonesia dituntut untuk mengidentifikasi suatu indeks harga yang relevan dengan kebijakan moneter yaitu indeks harga yang dapat

dikendalikan yang selanjutnya dapat dijadikan patokan (*anchor*) dalam implementasi kebijakan moneter.

Fluktuasi nilai tukar yang telah berkembang lima tahun terakhir ini merupakan masalah ekonomi yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan membaik (stabil) sehingga mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan bahkan telah memasuki masa resesi yang cukup dalam, inflasi meningkat pesat baik karena gangguan produksi maupun karena *imported inflation*, tingkat pengangguran semakin meningkat dan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin banyak serta permasalahan lainnya.

Disadari bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah hanya merupakan muara dari akumulasi permasalahan ekonomi yang selama ini terpendam baik yang dialami di sektor moneter, perbankan dan sektor riil. Dengan demikian usaha menstabilkan nilai tukar rupiah tidak akan bermanfaat jika tidak didukung dengan usaha-usaha pembenahan seluruh kelemahan aspek perekonomian nasional baik berupa sistem, perangkat dan peraturan. Sehubungan dengan hal tersebut pembenahan di sektor mikro bersamaan dengan kebijakan makro untuk menstabilkan nilai tukar rupiah merupakan langkah yang ideal untuk dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan kondisi, permasalahan dan karakteristik perekonomian nasional maka akan muncul permasalahan selanjutnya adalah bagaimana mempercepat stabilitas nilai tukar rupiah guna mempercepat usaha pemulihan ekonomi nasional. Sehingga manajemen moneter yang ideal untuk menstabilkan nilai tukar rupiah merupakan langkah yang sangat urgen termasuk apakah sistem nilai tukar *flexible* dan mengisolasi nilai tukar suatu negara dari perekonomian global, misalnya melalui *capital control* cukup memadai untuk diterapkan di Indonesia.

Kebijakan nilai tukar yang akan dilaksanakan oleh otoritas moneter dan pemerintah diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kestabilan harga (inflasi), baik inflasi yang disebabkan kenaikan permintaan akan barang dan jasa yang, kenaikan jumlah uang beredar maupun inflasi yang disebabkan dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi yang berasal dari luar tersebut diantaranya

disebabkan oleh impor barang sebagai bahan baku barang elektronik maupun otomatis bagi perusahaan Indonesia yang belum mampu memproduksi sendiri (Abimanyu,2000:2). Sehingga dengan terdepresiasinya rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat maka impotir akan merasakan bahwa barang-barang impor akan semakin mahal, yang pada gilirannya harga output pun akan meningkat.

Fenomena diatas telah mengindikasikan bahwa antara nilai tukar (*exchange rate*) dengan tingkat harga (inflasi) mempunyai hubungan yang signifikan atau saling berpengaruh dalam perekonomian suatu negara. Hal tersebut telah dibuktikan dengan penelitian empiris oleh Goeltom (1998:69) yang berjudul “Manajemen Nilai Tukar di Indonesia dan Permasalahannya” bahwa kebijakan nilai tukar akan mempunyai implikasi yang sangat mendasar terhadap tingkat harga (inflasi) diantaranya walaupun kebijakan ekspansioner akan mampu meningkatkan tingkat produksi namun tetap harus mempertahankan daya dukung perekonomian domestik (kapasitas produksi nasional). Jika tidak demikian maka kebijakan ekspansioner tersebut pada akhirnya akan mendorong laju inflasi. Selain itu Goeltom menambahkan bahwa nilai tukar merupakan *nominal anchor* dalam pengendalian inflasi. Nilai tukar banyak digunakan oleh negara-negara yang mengalami *chronic inflation* sebagai nominal anchor baik melalui pengendalian depresiasi nilai tukar maupun dengan mem-peg-kan nilai tukar suatu negara dengan satu mata uang asing. Demikian pula hasil penelitian empiris oleh para peneliti ekonomi Bank Indonesia yang menyatakan bahwa sasaran akhir pengendalian moneter adalah kestabilan harga (*single target*), sehingga pengelolaan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating*) adalah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada struktur industri Indonesia yang sarat dengan kandungan impor yang tinggi sehingga perubahan nilai tukar hanya berdampak terbatas terhadap kinerja ekspor, atau dengan perkataan lain nilai tukar yang terlalu berfluktuatif lebih banyak berdampak negatif terhadap perekonomian domestik.

Indikator ekonomi makro seperti nilai tukar dan tingkat harga (inflasi) pengaruhnya terhadap kestabilan perekonomian nasional juga telah diteliti oleh Fidiyanto (1999) bahwa perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin terbuka menyebabkan sangat pekanya perekonomian domestik terhadap gejolak perekonomian dunia, yaitu melalui harga barang-barang impor dan ekspor, neraca pembayaran dan nilai tukar. Menurut Tambunan (1998:46) beberapa *basic indicators* yang dapat digunakan untuk mengukur fundamental ekonomi makro yang mencerminkan kinerja sektor riil dan sektor moneter diantaranya PDB (Produk Domestik Bruto), tingkat inflasi, jumlah uang beredar, investasi, neraca pembayaran dan tingkat suku bunga. Dalam perkembangannya kebijakan nilai tukar bukan lagi hanya sekedar mengatur jumlah uang, tetapi juga mengatur variabel lain yang berkaitan erat dengan perkembangan jumlah uang antara lain inflasi dan nilai tukar. Nilai tukar merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruhnya yang sedemikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel makro lainnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana pengaruh antara 2 variabel ekonomi yaitu antara nilai tukar dan inflasi melalui hubungan kausalitas mulai tahun 1983.1-2000.4 dengan alasan bahwa pada tahun 1983 tepatnya 31 Maret 1983 telah dikeluarkannya kebijakan moneter dalam deregulasi perbankan, yaitu pelonggaran pembukaan cabang-cabang perbankan di Indonesia yang dampaknya akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional karena semakin banyaknya badan keuangan perbankan yang menjadi badan intermediasi keuangan bagi masyarakat (Nasution,1990:43). Sedangkan memilih tahun 2000 kuartal ke 4 karena ketersediaan data yang peneliti dapat dari sumber yang ada.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar dalam perekonomian Indonesia akhir-akhir ini. Kegiatan ekspor yang seharusnya meningkat akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar telah menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan. Sebaliknya nilai tukar riil telah menurunkan impor secara drastis

sehingga semakin memperburuk kinerja sektor produksi dan mengurangi pasokan barang dalam negeri sehingga menambah tekanan inflasi. Disisi lain menunjukkan bahwa rentanitas laju inflasi terhadap gejala eksternal semakin tinggi. Setelah band intervensi dilepas Bank Indonesia maka pergerakan nilai tukar menjadi tidak terbatas yang ditentukan oleh pasar. Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah hubungan sebab akibat antara inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar yaitu apakah inflasi menyebabkan semakin tingginya nilai tukar sehingga terjadi gejala rupiah terhadap dollar, atau apakah dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS akan menyebabkan semakin tingginya laju inflasi di Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengetahui arah hubungan kausalitas antara inflasi (tingkat harga) dengan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat tahun 1983.I – 2000.IV.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Pengembangan ilmu ekonomi dan studi pembangunan, khususnya ilmu ekonomi moneter yang berkaitan dengan masalah sebab akibat antara perubahan kurs dan inflasi.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi *policy decision maker* (otoritas moneter).
3. Sebagai acuan bagi peneliti lain dalam penulisan skripsi selanjutnya.



2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Fidianto (1999) telah meneliti tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat di Indonesia Tahun 1988.2 sampai dengan 1997.2. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan model penyesuaian parsial (PAM), dimana variabel bebas yang digunakan adalah jumlah uang beredar Indonesia (M), jumlah uang beredar Amerika Serikat (M^*), selisih tingkat inflasi ($I-I^*$), tingkat pendapatan nasional Indonesia (Y), tingkat pendapatan nasional Amerika Serikat (Y^*) dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS pada periode sebelumnya ($S(-1)$). Simpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. mata uang Rupiah dalam periode 1988-1996 cenderung mengalami *overvalued* yang dikarenakan laju pertumbuhan pendapatan nasional Indonesia lebih besar daripada laju pertumbuhan pendapatan nasional Amerika Serikat
2. jumlah uang beredar di Indonesia (M) menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat di Indonesia
3. jumlah uang beredar Amerika Serikat (M^*) menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat di Indonesia
4. pendapatan nasional Indonesia (Y) menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat di Indonesia
5. pendapatan nasional Amerika (Y^*) juga menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah/Dollar Amerika Serikat di Indonesia

6. selisih tingkat inflasi Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat di Indonesia
7. pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat satu periode sebelumnya ($S(-1)$) menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat pada periode penelitian.

Nurridha (1998) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB) dan Kurs Valuta Asing (Dollar Amerika) terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia tahun 1983 – 1997” telah menggunakan metode regresi linier berganda dalam menganalisisnya. Variabel terikat terdiri dari inflasi yang menggunakan pendekatan indeks harga konsumen (Y), sedangkan variabel bebas terdiri dari jumlah uang beredar dalam satuan rupiah (X_1) dan kurs valuta asing rupiah terhadap dollar (X_2). Simpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah perubahan jumlah uang beredar (JUB) dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 1983-1997.

Suryani (1999) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Tingkat Bunga dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Nilai Tukar Dollar Amerika Serikat di Indonesia tahun 1992-1997”. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan variabel terikat nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, sedangkan variabel bebas terdiri dari inflasi yang didekati dengan indeks harga konsumen (X_1), tingkat suku bunga deposito 3 bulanan (X_2) dan produk domestik bruto berdasarkan harga konstan tahun 1993 (X_3). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat suku bunga lebih berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat daripada tingkat inflasi dan jumlah uang beredar, sedangkan pengujian secara serentak ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat.

Penelitian Qoriah (2000) dengan menggunakan metode *two step single equation* dan *rational expectation* dengan model empiris dari Senopati sebagai

model dasar meneliti studi komparatif inersia inflasi di ASEAN dengan pendekatan model dinamis. Disini Qorih menyimpulkan bahwa antara Indonesia dan Filipina mengalami proses penyesuaian tingkat harga (inflasi) dengan cepat. Kesimpulan tersebut didukung dengan alasan bahwa Filipina memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam beberapa hal meskipun dalam takaran yang relatif, misalnya problematika makro ekonomi yang dihadapi masih relatif sama (tingginya inflasi, tingginya pengangguran dan dihadapkan pada masalah pemerataan pembangunan), memiliki 'status' yang sama sebagai negara berkembang dalam golongan pendapatan per kapita yang sama (*World Bank*, 1996), dilihat dari waktu dan tahapan pelaksanaan liberalisasi ekonomi yang diterapkan Indonesia dan Filipina relatif mempunyai kesamaan yaitu sekitar dekade 80-an dan yang terakhir berdasarkan 'letak'nya sama-sama di kawasan Asia Tenggara dan anggota ASEAN. Menurut Basri (1995:223) hasil survei opini eksekutif sedunia yang dimuat dalam *World Competitiveness Report* yang menempatkan beberapa negara Asia Timur pada peringkat atas dari segi daya saingnya. Indonesia menempati urutan 31 yang masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan Filipina yang berada pada urutan 33. Oleh karena penyesuaian tingkat harga di Indonesia dan Filipina berjalan dengan cepat, maka kebijakan yang bersifat restriktif lebih efektif, mengawasi dan memprioritaskan paket kebijakan yang terkait dengan sektor riil dan produksi dan laju inflasi setidaknya dapat dikendalikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian efektivitas kebijakan moneter dapat lebih terjamin dan pengawasan harga terhadap produk-produk vital perekonomian secara lebih ketat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Inflasi

Pendapat berbagai sumber/pengamat ekonomi tentang pengertian inflasi substansinya adalah sama yaitu kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga hanya pada beberapa barang dan terjadi dalam waktu sesaat (*temporer*) bukan termasuk dalam kategori terjadinya inflasi.

Menurut Dawson (1992:10) dalam bukunya *Inflation and Employment: Causes, Consequences and Cures* mendefinisikan inflasi sebagai berikut: “*Inflation is a sustained rise in the general level of prices or a persistent fall in the value of money. An overnight once-for-all rise in the prices of all the goods bought and sold in the economy does not in itself constitute inflation*”. Pernyataan Dawson mengindikasikan bahwa inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum atau telah terjadi penurunan nilai uang. Kenaikan harga barang-barang yang terbeli dan terjual pada saat tertentu dalam terminologi ekonomi tidak dikategorikan sebagai terjadinya inflasi.

Inflasi berdasarkan sifatnya menurut Sinungan (1991:50) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut yang terbagi atas:

- a. inflasi ringan (di bawah 10% pertahun)
yaitu inflasi yang ditandai dengan laju inflasi yang rendah dan kenaikan harga berjalan secara lamban dengan persentase yang kecil dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama.
- b. inflasi sedang (antara 10% - 30% pertahun)
yaitu inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga-harga yang cukup tinggi hingga mencapai *double* atau *triple* digit dan mempunyai kecenderungan mengakibatkan terjadinya pemercepatan laju inflasi dalam jangka pendek, sehingga dampak yang diakibatkan terhadap kondisi perekonomian lebih parah daripada jenis inflasi ringan.
- c. hiperinflasi (antara 30% - 100% pertahun)
yaitu inflasi yang ditandai dengan kenaikan harha-harga barang 5 sampai 6 kali lipat, sehingga dampak dari kenaikan harga tersebut

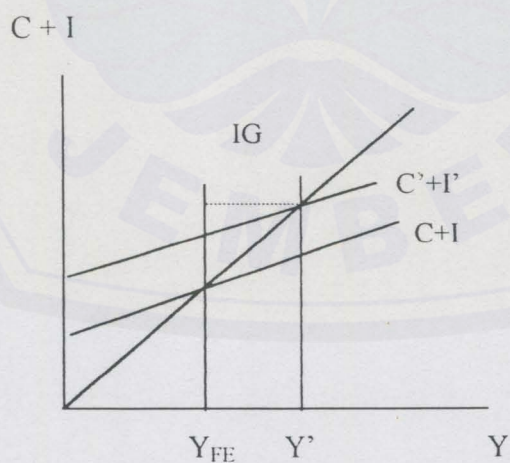
adalah terjadinya penurunan nilai riil uang lebih parah daripada jenis inflasi ringan dan sedang, perputaran uang semakin cepat dan masyarakat akan lebih memilih untuk berkonsumsi daripada untuk kegiatan *saving* agar kebutuhannya terpenuhi. Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada saat pemerintah dalam keadaan “defisit anggaran belanja” yang dibiayai dengan pencetakan uang baru.

2. Didasarkan pada sebab awal inflasi

Menurut Nopirin (1996:28) jenis inflasi menurut sebabnya dapat dikategorikan menjadi:

- a. inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat (*demand pull inflation*).

Jika dalam hal ini diasumsikan perekonomian dalam keadaan kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan agregat akan mengakibatkan kenaikan harga-harga selain meningkatkan jumlah output. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini:



Gambar 2.1: Inflationary Gap

Keterangan:

$C + I$ = kurva konsumsi dan investasi awal

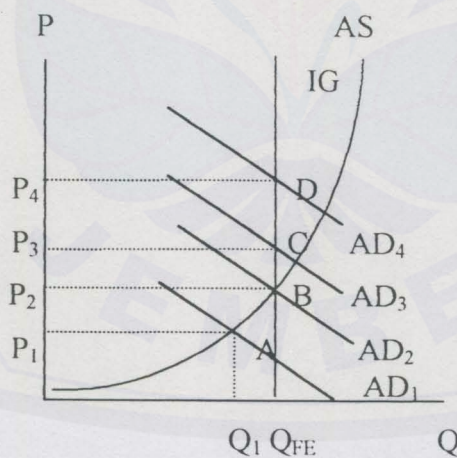
$C' + I'$ = kurva konsumsi dan investasi akhir

IG = Inflationary Gap

Y_{FE} = pendapatan nasional dalam keadaan full employment

Kenaikan permintaan agregat tersebut akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan (*disequilibrium*) jika dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya kenaikan permintaan tersebut. Kenaikan permintaan agregat tersebut mengakibatkan keseimbangan output bergeser ke kanan dari Y_{FE} ke Y' , maka hal ini akan menimbulkan inflasi dan sering apa yang disebut dengan *inflationary gap*.

Proses terjadinya *demand pull inflation* dapat diilustrasikan dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran total sebagai berikut:



Gambar 2.2 : Demand Pull Inflation

Keterangan:

AD = kurva permintaan agregat

AS = kurva penawaran agregat

Q_{FE} = kuantitas barang dalam kondisi full employment

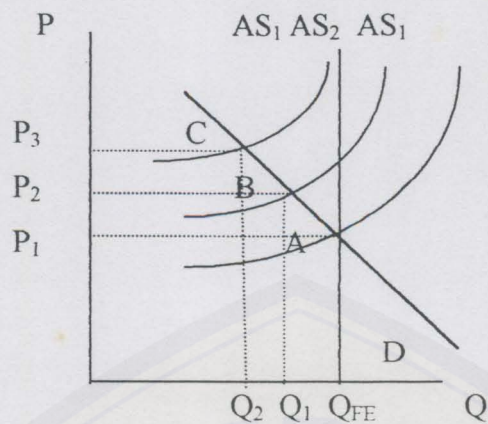
P = harga barang

- IG = Inflationary gap
 A,B,C,D = titik-titik keseimbangan antara kurva permintaan dan penawaran

Gambar di atas memperlihatkan bahwa perpotongan antara kurva AD_1 dengan kurva AS akan menghasilkan tingkat harga P_1 dan output Q_1 (titik A), dimana titik (P_1, Q_1) berada di sebelah kiri output kesempatan kerja penuh. Hal ini berarti bahwa terdapat sebagian penawaran yang belum diimbangi oleh sejumlah permintaan (*supply > demand*). Pada titik B kurva AD_2 yang berpotongan dengan AS tepat berada pada garis Q_{FE} , yang berarti jumlah penawaran yang ada telah diimbangi oleh sejumlah permintaan pada keadaan kesempatan kerja penuh, yang mengakibatkan kenaikan harga dari P_1 ke P_2 (Jaya, 1996:3). Apabila permintaan melebihi dari barang yang tersedia seperti kurva AD_3 dan AD_4 (tingkat output berada di sebelah kanan tingkat output dalam keadaan kesempatan kerja penuh = Q_{FE}), kenaikan harga-harga akan terus berlanjut ke P_3 dan P_4 .

- b. inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*).

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi meliputi kenaikan biaya bahan baku, upah pekerja maupun biaya operasional yang lain. Inflasi yang terjadi dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga dan memicu terjadinya penurunan tingkat output (resesi). Proses terjadinya inflasi ini dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:



Gambar 2.3: Cost Push Inflation

Keterangan:

P = harga barang

Q = kuantitas barang

AS = kurva penawaran agregat

D = kurva permintaan

QFE = kuantitas barang dalam keadaan full employment

A,B,C = titik-titik keseimbangan antara kurva penawaran dan permintaan

Gambar di atas memperlihatkan bahwa pada titik A (P_1, Q_{FE}) yaitu titik potong antara kurva AD dengan AS_1 berada pada posisi keseimbangan, yang berarti jumlah barang yang diminta diimbangi dengan jumlah penawaran. Apabila terjadi kenaikan biaya produksi, misalnya naiknya harga bahan baku, maka biaya per unit barang tersebut juga akan naik dari P_1 ke P_2 dan jumlah output yang dihasilkan akan menyesuaikan tidak sebesar jumlah output sebelum terjadi kenaikan harga bahan baku dari Q_{FE} ke Q_1 , sehingga kurva AS bergeser dari AS_1 ke AS_2 . Apabila kenaikan biaya produksi semakin meningkat, maka pergeseran kurva AS akan terus berlangsung ke arah kiri dari AS_2 ke AS_3 yang akan berdampak pula pada kenaikan harga dari P_2 ke P_3 dan berkurangnya output dari Q_1 ke Q_2 .

3. Didasarkan pada asal terjadinya inflasi yang dapat dibedakan atas:

a. inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

yaitu inflasi yang terjadi akibat ketidakseimbangan neraca anggaran pemerintah (defisit anggaran) yang dibiayai oleh pencetakan uang baru. Pencetakan uang baru mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi lebih, yang berarti permintaan akan barang meningkat melebihi jumlah persediaan dan dampaknya pada kenaikan harga barang.

b. inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

yaitu inflasi yang timbul akibat gangguan (syok) eksternal/dari luar negeri. Hal ini tercermin pada kenaikan harga bahan-bahan impor yang digunakan sebagai bahan baku produksi dalam negeri. Kenaikan biaya bahan baku tersebut akan mengakibatkan kenaikan biaya per unit barang yang diproduksi (*increasing unit cost*). Kenaikan harga bahan baku impor erat kaitannya dengan nilai tukar (kurs) rupiah dengan mata uang negara lain (*hard currency*, misal US Dollar). Hal ini dapat dicontohkan disaat Indonesia dilanda krisis pada pertengahan 1997 sampai dengan awal 1999 yang dipicu oleh efek ketertularan (*contagion effect*) dari krisis negara-negara Asia Timur. Terdepresiasi rupiah terhadap dollar telah mempersulit dunia bisnis ataupun industri pada umumnya untuk dapat bertahan (*survive*) (Abimanyu,2000:1).

Apabila mencermati pengertian inflasi yang telah dijelaskan di atas, tercermin bahwa ilmu ekonomi menyajikan dari sudut pandang bidang ekonomi secara obyektif. Namun dalam fenomena yang terjadi tidaklah demikian. Kenaikan tingkat harga-harga saat ini sering dipengaruhi oleh sentimen pasar yang peka terhadap kondisi non ekonomi yang terjadi. Artinya masalah inflasi dalam arti lebih luas bukan hanya merupakan masalah ekonomi, akan tetapi juga mencakup masalah sosio-ekonomi-politis. Berkaitan dengan hal ini ilmu ekonomi membantu kita untuk mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya inflasi secara

obyektif, misalnya karena pemerintah mencetak uang baru terlalu banyak (Boediono,1988:83).

Kondisi ekonomi sosio-politis di setiap negara tentu berbeda-beda sesuai dengan tatanannya masing-masing. Kaitannya dengan masalah inflasi, para ahli ekonomi lebih memfokuskan perhatiannya pada faktor-faktor ekonomi obyektif. Hal ini disebabkan karena *pertama*, memang sudah menjadi kompetensinya dalam bidang ekonomi dan yang *kedua*, agar dalil-dalil ekonominya dapat diterima secara universal. Artinya walaupun kondisi ekonomi-sosio-politis setiap negara beragam, namun dalil-dalil ekonomi tersebut secara mendasar dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi seperti inflasi.

Teori inflasi secara garis besar dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok menurut Boediono (1984:97), yaitu:

a. Teori Kuantitas

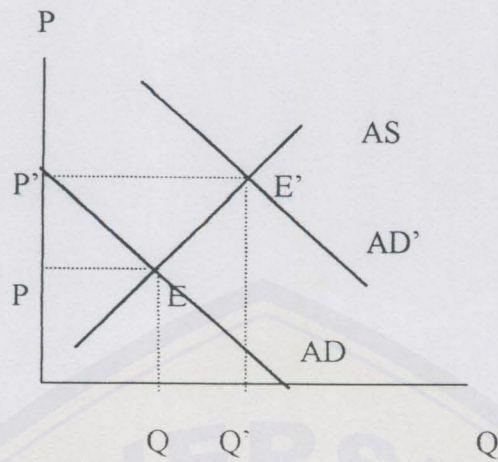
yaitu teori yang memfokuskan pada peranan proses inflasi dari:

1. jumlah uang beredar

yaitu inflasi yang disebabkan karena peningkatan jumlah uang beredar (JUB) baik berupa uang kartal maupun giral. Hal ini dapat dicontohkan pada fenomena terjadinya defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Menurut teori ini kenaikan harga-harga dapat berhenti atau bahkan dalam kondisi stabil apabila volume uang beredar dapat terkendali. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Milton Friedman yang menyatakan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter.

2. psikologis (harapan masyarakat)

yaitu inflasi yang disebabkan karena peningkatan jumlah uang beredar (JUB) dan oleh psikologis masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang.



Gambar 2.4: Pergeseran Kurva Agregate Demand

Keterangan:

P, P' = harga barang awal dan akhir

Q, Q' = kuantitas barang awal dan akhir

AD = kurva permintaan agregat

AS = kurva penawaran agregat

E, E' = titik keseimbangan antara kurva penawaran dan permintaan awal dan akhir

b. Teori Keynes

Keynes mengkaji masalah inflasi didasarkan atas teori makronya yang memandang bahwa inflasi terjadi karena terdapat perebutan rezeki antar kelompok sosial masyarakat yang berkeinginan memperoleh bagian yang lebih besar daripada yang telah disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan tersebut membawa dampak terjadinya peningkatan permintaan efektif masyarakat akan barang-barang, dimana jumlah permintaan tersebut melebihi dari barang-barang yang tersedia (terjadi *inflationary gap*). Angka inflasi akan mulai menurun apabila permintaan efektif oleh masyarakat tersebut tidak melebihi jumlah output yang tersedia.

c. Teori Strukturalis

Merupakan suatu teori yang didasarkan pada penelitian empiris di negara-negara Amerika Latin yang menitikberatkan pada ketegaran (*inflexibilities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Kaum strukturalis mengkaitkan masalah inflasi dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian, dimana faktor-faktor struktural tersebut merupakan faktor-faktor yang hanya bisa berubah secara gradual dalam jangka panjang, sehingga teori ini dapat pula disebut sebagai teori “inflasi jangka panjang”. Faktor-faktor struktural jangka panjang yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Ketidakelastisan penerimaan ekspor, yaitu kelambanan pertumbuhan nilai ekspor terjadi lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain.
2. Ketidakelastisan produksi (*supply*) bahan makanan dalam negeri

2.2.2 Teori Nilai Tukar (Kurs)

2.2.2.1 Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar (kurs) dapat didefinisikan secara sederhana sebagai harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Terjadinya “harga” uang tersebut relatif sama dengan mekanisme yang terjadi pada harga produk. Berkaitan dengan hal tersebut nilai tukar dapat diartikan terjadinya keseimbangan penawaran dan permintaan dari suatu mata uang di pasar uang. Namun secara umum *equilibrium exchange rate* dapat didefinisikan sebagai nilai tukar yang mencerminkan keseimbangan di pasar barang dan jasa ekspor dan sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian moneter (Classen, 1996:43).

Kebijakan nilai tukar di Indonesia pada dasarnya mempunyai fungsi ganda. Pertama, untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran yang akhirnya bermuara pada tingkat kecukupan cadangan devisa yang dikelola oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu dalam menetapkan arah kebijakan nilai tukar tersebut diutamakan untuk mendorong dan menjaga *competitiveness* ekspor non

migas dalam upaya untuk mengurangi defisit *current account*. Kedua, untuk menjaga kestabilan pasar domestik agar nilai tukar tidak dijadikan sebagai suatu “*tool*” yang akan menambah atau mengurangi likuiditas masyarakat. Apabila masyarakat menilai USD terlalu murah (Rupiah *undervalued*) maka masyarakat akan menjual USD kepada Bank Indonesia (Waluyo dan Siswanto, 1998:88).

2.2.2.2 Sistem Nilai Tukar

Sistem penentuan nilai mata uang asing menurut Lipsey (1997:203) dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Sistem Nilai Tukar Fleksibel (*Flexible Exchange Rate*) atau Nilai Tukar Mengambang (*Floating Exchange Rate*)
yaitu nilai tukar valuta asing yang dibiarkan bebas untuk ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar (bergerak berdasarkan mekanisme pasar) tanpa adanya campur tangan oleh otoritas moneter dan pemerintah.
2. Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchange Rate*) atau Nilai Tukar yang Dipatok (*Pegged Exchange Rate*)
yaitu nilai tukar valuta asing yang ditentukan dan dipertahankan oleh pemerintah untuk periode jangka panjang pada nilai nominal tertentu.
3. Sistem Patok yang dapat Disesuaikan (*Adjustable Peg System*)
yaitu sistem nilai tukar dimana pemerintah menetapkan dan berusaha menjaga nilai nominal untuk nilai mata uang dalam negeri, tetapi secara eksplisit pemerintah menyadari bahwa akan ada situasi-situasi yang mengharuskan untuk mengubah nilai nominal tersebut. Sistem ini mempunyai nilai tukar yang tetap dalam jangka pendek, kemudian dapat berubah sesuai dengan ketidakseimbangan neraca pembayaran yang berlangsung terus menerus.
4. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (*Managed Float System*) atau Sistem Mengambang Kotor (*Dirty Float System*)
yaitu sistem nilai tukar yang didalamnya terdapat campur tangan (intervensi) dari Bank Sentral suatu negara dalam pasar valuta asing untuk mengatur nilai

valuta asing dan bukan untuk menentukan atau mempertahankan nilai nominal valuta asing yang diumumkan.

Keempat sistem nilai tukar di atas dapat disimpulkan bahwa sistem nilai tukar fleksibel dan nilai tukar tetap merupakan sistem nilai tukar yang ditentukan oleh mekanisme pasar dan pemerintah secara murni, sedangkan sistem nilai tukar patok dapat disesuaikan dan mengambang terkendali merupakan sistem campuran antara keduanya. Masing-masing sistem nilai tukar terdapat kelebihan dan kekurangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Sukirno (1997:366) kelebihan sistem nilai tukar tetap (*Fixed Exchange Rate*) adalah sebagai berikut:

1. menciptakan suasana kepastian dalam perdagangan luar negeri, karena dapat memudahkan para pengusaha memprediksi kondisi perdagangan di masa yang akan datang
2. mengurangi spekulasi atas jual beli valuta asing
3. menstabilkan harga-harga dalam negeri

Kekurangan dari sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) adalah:

1. menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan luar negeri, sebab sejarah menunjukkan bahwa sistem kurs tetap pada masa tertentu harus melakukan perubahan yang cukup besar atas kurs valuta asing
2. kurs valuta asing ditetapkan secara mendadak dan prosentase perubahannya relatif besar
3. pemerintah perlu memiliki cadangan valuta asing dalam jual beli valas. Apabila permintaan valuta asing melebihi penawarannya maka pemerintah menjual valuta asing untuk mengatasi kelebihan permintaan tersebut, begitu pula sebaliknya.

Kelebihan sistem nilai tukar berubah bebas, yaitu:

1. menciptakan kepastian perdagangan luar negeri dan mengurangi kegiatan spekulasi jual beli valuta asing, dikarenakan perubahan yang perlahan atas nilai mata uang asing tersebut
2. cadangan valuta asing tidak diperlukan karena kurs mengalami perubahan secara bebas dan pemerintah tidak perlu melakukan jual beli valuta asing di

pasar valuta asing untuk menyeimbangkan antara jumlah penawaran dan permintaan

Kekurangan sistem nilai tukar berubah bebas, yaitu:

1. menghambat pelaku ekonomi dalam memprediksi kondisi perdagangan di masa yang akan datang
2. menyebabkan kenaikan harga secara umum (inflasi), karena apabila kurs berubah terus menerus (melemah) maka harga barang-barang impor akan terus naik sehingga mengakibatkan penurunan nilai mata uang dalam negeri.

Perubahan sistem devisa juga terjadi dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 1971 sampai dengan 1978 menganut sistem nilai tukar tetap (*fixed rate*) dimana Rupiah secara langsung dikaitkan dengan nilai USD. Akan tetapi sejak tahun 1979 sistem nilai tukar diubah menjadi mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*), dimana nilai tukar Rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan USD, akan tetapi terhadap sekeranjang *valuta partner* dagang utama. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah meskipun diarahkan ke sistem nilai tukar mengambang namun tetap menitikberatkan pada unsur pengendalian. Hal tersebut berarti sistem nilai tukar yang dijalankan adalah *stable but adjustable exchange rate*, yaitu Bank Indonesia selalu berupaya untuk menciptakan kurs rupiah yang realistis yang mampu menunjang daya saing produk dalam negeri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah sehingga tercipta kestabilan moneter (Waluyo dan Siswanto, 1998:88).

Menurut Nasution (1995:25-26) prediksi ahli ekonomi neo klasik (Milton Friedman) ternyata sistem nilai tukar (kurs) mengambang tidak dapat menciptakan kestabilan nilai tukar uang antar negara. Negara-negara berkembang seperti Indonesia mempunyai masalah institusional sehingga tidak memiliki spekulator yang efisien yang digambarkan oleh Milton Friedman. Infrastruktur fisik dan sosial di Indonesia masih jauh dari memadai untuk mengembangkan pasar keuangan yang efisien. Kemudian prediksi aliran Keynes tentang sistem mengambang ternyata tidak terbukti dalam realitas. Depresiasi nilai mata uang nasional suatu negara yang mengalami defisit neraca berjalan pada neraca

pembayaran luar negerinya akan meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan. Kemudian kenaikan nilai ekspor tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan selanjutnya meningkatkan impor, sehingga neraca berjalan menjadi seimbang kembali dan bahkan menjadi surplus.

Konsep nilai tukar dalam analisis ekonomi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

- a. Konsep nilai nominal (kurs nominal)
yaitu konsep yang digunakan untuk menganalisis likuiditas perekonomian
- b. Konsep nilai riil efektif (*real effective exchange rate*) disingkat REER yaitu konsep yang menggunakan paritas daya beli (*purchasing power parity*) disingkat PPP (Sadoulet and Janvry, 1996:215-217).

Pemikiran awal doktrin PPP ini dikemukakan oleh Wheatly dan Ricardo di awal abad XIX, yang kemudian diulas kembali secara lebih jernih oleh Cassel pada 1920-an. Doktrin PPP yang orisinal memiliki 2 (dua) versi, yaitu versi absolut dan versi relatif. Versi absolut menyatakan bahwa nilai tukar keseimbangan sama dengan rasio antara tingkat harga domestik dengan tingkat harga negara pasangannya. Versi relatif menyatakan dari sudut perubahannya. Versi tersebut dengan cara lain dapat dirumuskan:

$$\text{Absolute PPP} : \text{KURS} = P_d/P_f \dots\dots\dots(2.1)$$

$$\text{Relative PPP} : \Delta (\text{KURS}) = (P_d) / \Delta (P_f) \dots\dots\dots(2.2)$$

Interpretasi absolut merupakan perbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lain yang ditentukan oleh tingkat harga di masing-masing negara. Interpretasi relatif merupakan perbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lain yang ditentukan oleh perubahan-perubahan harga di masing-masing negara. Doktrin PPP tersebut banyak mengundang kontroversi sehubungan dengan tidak spesifiknya mekanisme yang menghubungkan antara nilai tukar dengan tingkat harga. Satu sisi menyatakan bahwa doktrin PPP lebih bermanfaat apabila dipandang sebagai faktor penentu nilai tukar sehingga dapat digunakan sebagai variabel kebijakan nilai tukar. Sementara disisi lain hanya memandangnya

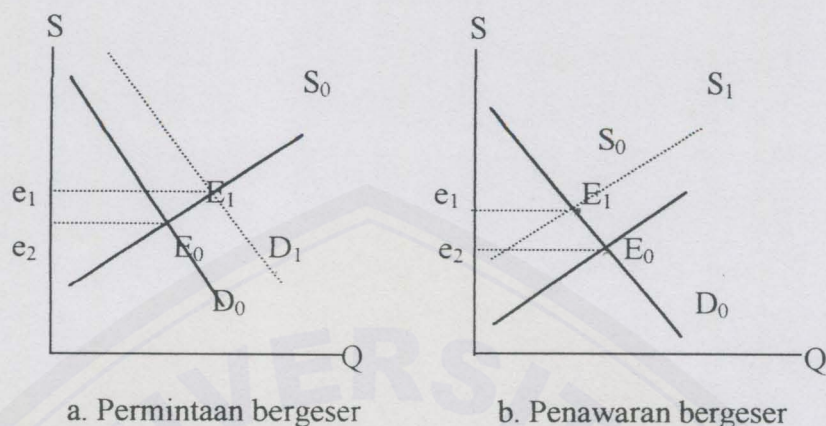
sebagai sebuah penjelasan singkat atas relasi antara variabel nilai tukar dengan tingkat harga (Frankel,1978:170-174).

Pencetus ide awal doktrin PPP adalah Wheatly dan Ricardo yang memandang doktrin PPP sebagai perluasan dari teori kuantitas uang dalam perekonomian terbuka. Sehingga nilai tukar sebagaimana harga diperlakukan sebagai variabel moneter. Doktrin PPP oleh Wheatly disebut dengan "*the par of produce*" yang ditentukan oleh fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar.

Perhatian yang lebih serius tentang pemikiran doktrin PPP dibuat oleh Cassel (1920) dengan memberikan perhatiannya pada 2 (dua) hal pokok yaitu (1) PPP sebagai faktor penentu yang dapat dianggap sebagai variabel kebijakan dan (2) menentukan indeks harga sebagai faktor yang pantas digunakan sebagai perhitungan paritas (Nusantara,1999:10). Pemikiran pertama mengenai PPP sebagai faktor penentu memiliki penafsiran yang beragam. Satu sisi pemikiran yang bersifat ekstrem menyatakan bahwa PPP merupakan faktor penentu keseimbangan nilai tukar yang sebenarnya (*the true equilibrium exchange rate*). Sisi ekstrem yang lain disampaikan oleh Taussig bahwa konsep PPP tidak banyak bermanfaat jika dikaitkan dengan nilai tukar keseimbangan (Frankel,1979:171). Penulis kebanyakan menyimpulkan bahwa walaupun doktrin PPP tidak fleksibel dari sudut penjabaran mekanisme dan sangat terbatas kemampuannya dalam menguraikan mekanisme hubungan tingkat harga dan nilai tukar, namun demikian doktrin PPP masih relevan apabila perubahan dalam perekonomian lebih merupakan akibat moneter daripada sebagai akibat dari perubahan sektor riil.

2.2.2.3 Perubahan Nilai Tukar

Kenaikan permintaan akan Dollar Amerika Serikat atau terjadi penurunan penawaran akan menyebabkan dollar mengalami apresiasi. Sehubungan dengan hal tersebut Lipsey (1997:205) menjelaskan melalui kurva di bawah ini tentang proses perubahan nilai tukar:



Gambar 2.5: Pergeseran Permintaan dan Penawaran Dollar Amerika

Serikat

Keterangan:

S_0 = kurva penawaran awal

S_1 = kurva penawaran akhir

D_0 = kurva permintaan awal

D_1 = kurva permintaan akhir

E_0 = titik equilibrium awal

e_1 = nilai equilibrium akhir

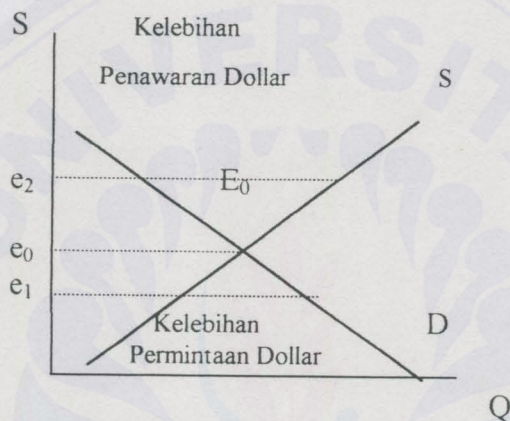
E_1 = titik equilibrium akhir

e_2 = nilai equilibrium awal

Kurva permintaan dan penawaran awal D_0 dan S_0 . Ekuilibrium berada di E_0 , dengan nilai tukar e_0 . Kenaikan permintaan akan Dollar Amerika Serikat telah ditunjukkan oleh pergeseran ke kanan kurva permintaan dari D_0 ke D_1 dibagian (a) atau penurunan penawaran Dollar Amerika Serikat seperti di bagian (b). Pergeseran tersebut akan menyebabkan Dollar Amerika Serikat mengalami apresiasi. Kedua bagian ekuilibrium baru adalah E_1 dan apresiasi ditunjukkan oleh kenaikan nilai tukar dari e_0 ke e_1 . Terjadinya penurunan permintaan akan Dollar Amerika Serikat yang telah ditunjukkan oleh pergeseran ke kiri kurva permintaan dari D_1 ke D_0 di bagian (a), atau kenaikan penawaran Dollar Amerika Serikat yang telah ditunjukkan oleh pergeseran ke kanan kurva penawaran dari S_1 ke S_0 di bagian (b), yang akan mengakibatkan Dollar Amerika Serikat terdepresiasi. Ekuilibrium bergeser dari E_1 ke E_0 dan depresiasi ditunjukkan oleh turunnya nilai tukar dari e_1 ke e_0 pada kedua gambar tersebut

2.2.2.4 Penentuan Nilai Tukar

Menurut Lipsey (1997:204) nilai tukar yang berlaku akan menyesuaikan dengan kondisi neraca pembayaran dan tingkat transaksi pemerintah, karena tanpa adanya transaksi oleh pemerintah nilai tukar akan berubah menjadi fleksibel dan neraca pembayaran sama dengan nol. Jika transaksi oleh pemerintah nol, maka nilai tukar fleksibel. Penentuan nilai tukar tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:



Gambar 2.6: Nilai Tukar Tetap dan Fleksibel

Keterangan:

D = kurva permintaan Dollar AS

S = kurva penawaran Dollar As

Q = kuantitas permintaan Dollar As

E = titik keseimbangan antara kurva penawaran dan permintaan Dollar AS

Nilai tukar akan berubah untuk menyamakan permintaan dan penawaran Dollar Amerika Serikat, yaitu pada titik E_0 dengan nilai tukar e_0 . Jika nilai tukar lebih rendah dari E_0 , misalnya e_1 maka permintaan Dollar Amerika Serikat akan melebihi penawaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan valuta asing yang diinginkan melebihi pembayaran yang diinginkan. Dollar Amerika Serikat mengalami apresiasi sampai mencapai e_0 dan mencapai keseimbangan di titik E_0 . Jika nilai tukar berada di atas e_0 , misalnya pada titik e_2 , maka permintaan

akan Dollar Amerika Serikat akan lebih rendah daripada penawaran. Hal ini berarti penerimaan valuta asing yang diinginkan lebih kecil daripada pembayaran yang diinginkan. Nilai Dollar Amerika Serikat akan mengalami depresiasi sampai pada titik e_0 dan keseimbangan akan dicapai pada titik E_0 .

Sehubungan dengan penetapan nilai tukar, pemerintah dapat menetapkan nilai tukar dengan memanfaatkan transaksi pemerintah untuk mengantisipasi kelebihan permintaan atau penawaran yang terjadi pada sistem nilai tukar tetap. Jika pemerintah memilih untuk menetapkan nilai tukar yang pada gambar pada posisi e_1 , maka akan terjadi surplus neraca pembayaran karena penerimaan valuta asing akan melebihi pembayaran. Bank Sentral akan mengumpulkan valas dan memasok dollar Amerika Serikat untuk memenuhi kelebihan permintaan. Akan tetapi jika Bank Sentral memilih untuk menetapkan nilai tukar pada posisi e_2 , maka akan terjadi defisit neraca pembayaran karena permintaan valas akan lebih kecil daripada pembayaran. Oleh karena itu bank Sentral akan membayarkan valuta asing dan menarik semua kelebihan penawaran Dollar Amerika Serikat.

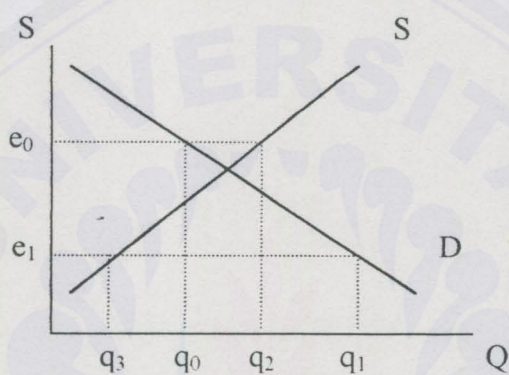
2.2.2.5 Nilai Tukar Spot dan Nilai Tukar Berjangka

Transaksi valuta asing berlangsung secara seketika dan kedua belah pihak sepakat untuk saling menukarkan simpanan bank mereka secara cepat. Nilai tukar yang melandasi perdagangan seketika (*on the spot*) disebut nilai tukar spot (*spot exchange rate*), sedangkan kesepakatannya disebut transaksi spot.

Istilah “seketika” atau “spot” umumnya dianggap kurang tepat mengingat pertukaran spot lazimnya baru dilaksanakan dua hari setelah tercapainya kesepakatan. Keterlambatan ini terjadi karena dalam kebanyakan transaksi bank memerlukan waktu dua hari untuk melakukan interaksi pembayaran. Beberapa kesepakatan valuta asing seringkali secara khusus menetapkan suatu tanggal nilai lebih dua hari; atau 30 hari; 90 hari; 180 hari atau bahkan beberapa tahun. Nilai tukar yang menjadi dasar bagi transaksi semacam ini disebut nilai tukar berjangka (*forward exchange rate*).

2.2.2.6 Pasar Valuta Asing

Kegiatan perdagangan valas dalam pasar valuta asing permintaan mata uang asing mengindikasikan penawaran Dollar Amerika Serikat, sedangkan penawaran mata uang asing mengindikasikan permintaan akan Dollar Amerika Serikat. Permintaan akan Dollar Amerika Serikat mempunyai slope negatif, sedangkan sisi penawaran mempunyai slope positif. Berikut gambar yang menjelaskan penawaran dan permintaan yang dimaksud (Lipsey,1997:201):



Gambar 2.7 : Pasar Valuta Asing

Keterangan:

- S = kurva penawaran Dollar AS di pasar valas
- D = kurva permintaan Dollar AS di pasar valas
- e = nilai tukar
- q = kuantitas permintaan Dollar AS

Permintaan akan dollar di pasar valuta asing (D) menggambarkan jumlah transaksi yang menghasilkan penerimaan valuta asing. Bila nilai tukar e_0 maka kuantitas permintaan Dollar Amerika Serikat adalah q_0 . Depresiasi Dollar Amerika Serikat ditunjukkan dengan penurunan nilai tukar ke e_1 ; permintaan asing akan barang dan aset Amerika Serikat meningkat; dan karenanya kuantitas Dollar Amerika Serikat yang diminta juga naik dari q_0 ke q_1 . Apresiasi akan menimbulkan efek sebaliknya yaitu kenaikan nilai tukar dari e_1 ke e_0 menyebabkan kuantitas Dollar Amerika Serikat yang diminta turun dari q_1 ke q_0 .

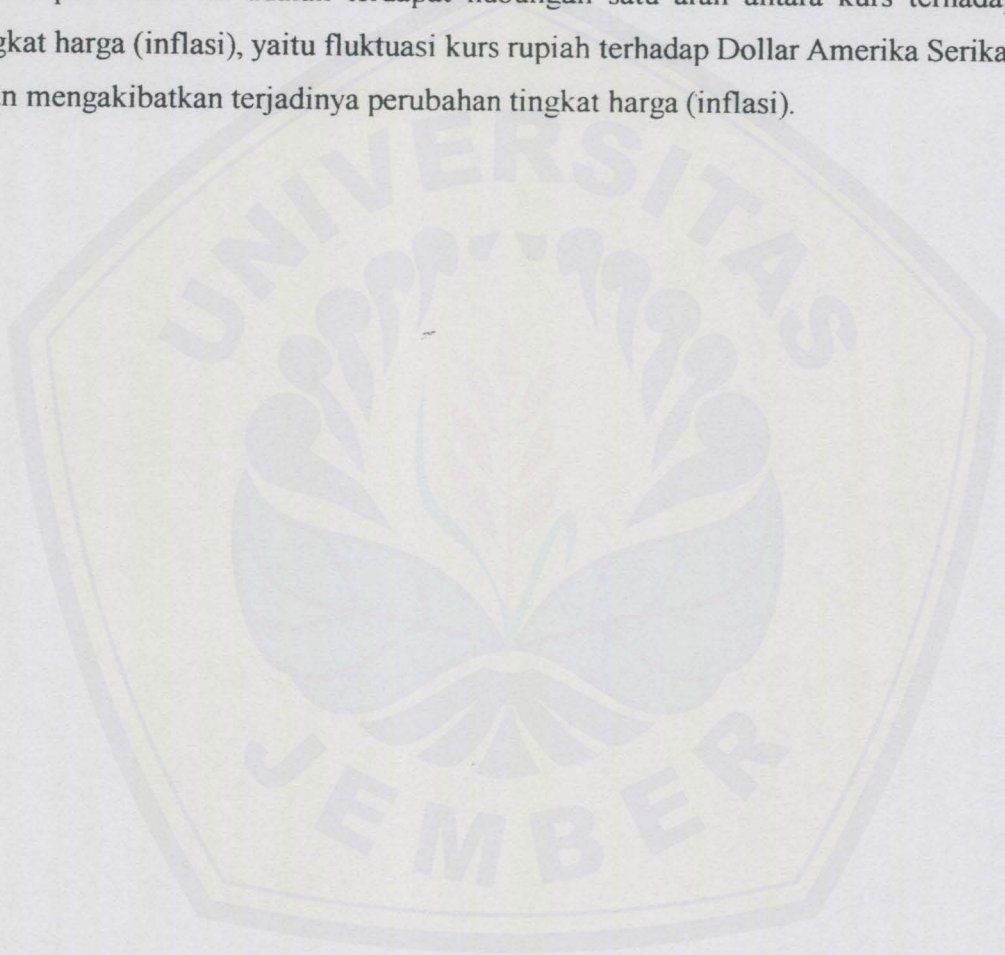
Penawaran Dollar Amerika Serikat di pasar valuta asing (S) menggambarkan jumlah transaksi yang membutuhkan pembayaran valuta asing. Apabila nilai tukar adalah e_0 maka kuantitas penawaran Dollar Amerika Serikat adalah q_2 . Depresiasi Dollar Amerika Serikat menyebabkan nilai tukar turun ke e_1 , permintaan Amerika Serikat akan barang dan aset turun dan karenanya kuantitas Dollar Amerika Serikat yang ditawarkan ke pasar valuta asing juga turun dari q_2 ke q_3 . Apresiasi menimbulkan akibat sebaliknya yaitu kenaikan nilai tukar dari e_1 ke e_0 menyebabkan kuantitas Dollar Amerika Serikat yang ditawarkan naik dari q_3 ke q_2 .

2.3 Hipotesis

Kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan inflasi merupakan fenomena moneter yang perlu mendapatkan prioritas dalam mengatasinya. Kurs rupiah yang setiap saat berfluktuasi hingga mencapai Rp11.350 per Dollar Amerika Serikat mengakibatkan kondisi perekonomian nasional semakin terpuruk dan tidak kondusif, terutama kenaikan tingkat harga umum (inflasi) yang semakin tidak stabil. Kedua indikator ekonomi tersebut bahkan merupakan pokok utama yang akan dibahas oleh tim *International Monetary Fund* (IMF) dengan pemerintah beserta otoritas moneter, selain pembahasan tentang amandemen undang-undang Bank Indonesia. Hasil pertemuan tersebut diharapkan tidak terjadi *overlapping* antara kebijakan pemerintah dan keinginan yang intervensif dari tim *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hubungan antara indikator ekonomi kurs dan tingkat harga (inflasi) tersebut mengacu pada teori dan fenomena inflasi di Indonesia. Inflasi yang terjadi di Indonesia dipengaruhi kuatnya faktor eksternal (*imported inflation*), dimana jika harga-harga barang impor naik maka harga barang dalam negeri yang bahan bakunya dari barang impor maka mengalami kenaikan juga. Fenomena tersebut dapat dilihat dengan jelas pada saat badai krisis melanda Indonesia sejak Juli 1997, pada saat kurs rupiah melemah begitu cepat diikuti dengan kenaikan harga-harga umum. Demikain halnya dengan teori *purchasing power parity* (PPP)

baik interpretasi absolut maupun interpretasi relatif yang menyatakan bahwa perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lain ditentukan oleh tingkat harga di masing-masing negara. Namun pada kenyataan yang ada angka inflasi yang berfluktuasi di Indonesia belum menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap fluktuasi kurs. Sehubungan dengan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan satu arah antara kurs terhadap tingkat harga (inflasi), yaitu fluktuasi kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat akan mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat harga (inflasi).



BAB III

METODE PENELITIAN



MPP UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder runtun waktu kuartalan periode 1985.I – 2000.IV. Apabila data kuartalan tidak tersedia maka akan dilakukan interpolasi data mengikuti metode interpolasi linier Insukindro (1993b:265) yaitu:

$$Q_{kt} = \frac{1}{4} Q_t \{1 - (k-2,5) (1-B)/4\}$$

Keterangan:

Q_{kt} = data kuartalan pada tahun ke t

Q_t = data tahun ke t

B = *backward lag operator*

k = 1,2,3,4

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausalitas antara variabel inflasi (*consumer price index*) dengan kurs (*exchange rate*) di Indonesia mulai tahun 1983.I sampai dengan 2000.IV.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data diperoleh dari studi literatur yang telah dipublikasikan seperti Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, laporan tahunan Bank Indonesia, International Financial Statistik – International Monetary Fund (IMF) dan Indikator ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan data *time series* mulai tahun 1983.I sampai dengan 2000.IV dengan alasan bahwa pada periode 1983 telah diberlakukannya paket deregulasi Pakjun, dimana kebijakan pemerintah pada saat itu akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Uji Kausalitas Granger (*Granger's Test Causality*)

Uji kausalitas Granger muncul akibat keterbatasan analisis regresi yang tidak mampu mengungkapkan ada tidaknya hubungan kausalitas meskipun regresi diyakini dapat mengukur derajat hubungan statistik antar variabel. Berkaitan dengan hal tersebut Granger mencoba untuk mendefinisikan hubungan antar variabel dalam X dikatakan menyebabkan Y, jika variasi Y dapat dijelaskan secara lebih baik dengan menggunakan nilai masa lalu X dibandingkan jika tidak menggunakan. Fokus uji kausalitas Granger dalam penelitian ini adalah analisis deret waktu atau *time series*. Konsep kausalitas Granger dikenal sebagai konsep kausalitas sejati atau konsep *predikibilitas*, dimana masa lampau dapat mempengaruhi masa kini atau masa datang. Namun masa kini atau masa datang tidak dapat mempengaruhi masa lalu. Substansi pengertian kausalitas adalah suatu variabel X menyebabkan Y apabila penyertaan nilai-nilai masa lalu X membutuhkan perkiraan yang lebih baik akan Y.

Variabel Y dan X dalam penelitian ini adalah inflasi (INF) dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (ER). Berkaitan dengan metode Granger, dua perangkat data *time series* yang linear sehubungan dengan variabel X dan Y diformulasikan dalam dua bentuk model regresi sebagai berikut (Arief,1993:152):

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-j} + u_t \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^r c_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^s d_j X_{t-j} + v_t \quad \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan:

u_t dan v_t = *error terms* yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan $m = n = r = s$.

Apabila variabel inflasi (INF) dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (ER) diformulasikan dalam metode Granger, maka persamaan tersebut menjadi:

$$INF_t = \sum_{i=1}^m a_i INF_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j ER_{t-j} + u_t \dots\dots\dots(3.3)$$

$$ER_t = \sum_{i=1}^r c_i ER_{t-i} + \sum_{j=1}^s d_j INF_{t-j} + v_t \dots\dots\dots(3.4)$$

Keterangan:

- INF = Nilai kenaikan harga (inflasi)
- ER = Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat
- m,n,r,s = *time lag*
- a_i = koefisien regresi dari inflasi (INF) pada INF = f(ER)
- b_j = koefisien regresi dari nilai tukar (ER) pada INF = f(ER)
- c_i = koefisien regresi dari ER pada ER = f(INF)
- d_j = koefisien regresi dari INF pada ER = f(INF)

Hasil-hasil regresi kedua bentuk model regresi linear tersebut akan menghasilkan 4 (empat) kemungkinan mengenai nilai koefisien-koefisien regresi masing-masing:

1. Jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j = 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari Y ke X.
2. Jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y.
3. Jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j = 0$, maka X dan Y bebas antara satu dengan yang lain.
4. Jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas dua arah antara Y dan X.

Indikasi berbagai bentuk kausalitas dalam metode Granger tersebut diperkuat dengan dilakukan uji F (F-test) untuk masing-masing model regresi.

3.3.2 Uji Kausalitas Sims (Sims's Test Causality).

Metode Sims yang merupakan jenis kedua dari pengujian kausalitas setelah Granger digunakan untuk mendeteksi kausalitas dalam model regresi linear. Metode Sims yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misalkan terdapat 2 (dua) seri data (Y dan X) yang telah mengalami proses transformasi dan koreksi sehingga menjadi seri data yang bersifat stationary. Berkaitan dengan hal tersebut, data ditransformasikan dalam bentuk logaritma dan difilter dengan (Arief, 1993:154):

$$(1 - 1,5L + 0,562L^2)$$

Keterangan:

$L = \text{lag operator}$.

Kedua seri data yang telah ditransformasikan dan difilter dapat disimbolkan $y^*(t)$ dan $x^*(t)$, sehingga persamaan-persamaan berikut kemudian ditaksir dengan menggunakan *ordinary least square*:

$$y^*(t) = a_1 + b_1 x^*(t) + c_1 x^*(t-i) + e(t)$$

$$y^*(t) = a_2 + b_2 x^*(t) + c_2 x^*(t-i) + d_2 x^*(t+i) + u(t)$$

$$x^*(t) = a_3 + b_3 y^*(t) + c_3 y^*(t-i) + v(t)$$

$$x^*(t) = a_4 + b_4 y^*(t) + c_4 y^*(t-i) + d_4 y^*(t+i) + w(t)$$

Berkaitan dengan persamaan di atas, kedua koefisien untuk nilai-nilai x^* dan y^* yang akan datang yaitu d_2 dan d_4 yang kemudian diuji apakah secara statistik signifikan atau tidak dengan menggunakan uji F (F-test). Uji F dilakukan untuk menguji *null-hypothesis* bahwa koefisien-koefisien untuk nilai-nilai x^* dan y^* yang akan datang secara statistik berbeda dari nol. Kemungkinan-kemungkinan

berikut dapat dikemukakan berkaitan dengan nilai-nilai koefisien ini sehingga diperoleh gambaran mengenai sifat kausalitas antara y dan x :

Hasil Tes	Jurusan Kausalitas
$d_2 = 0, d_4 = 0$	y dan x bebas antara satu dengan yang lain
$d_2 \neq 0, d_4 = 0$	y menentukan x ($y \rightarrow x$)
$d_2 = 0, d_4 \neq 0$	x menentukan y ($x \rightarrow y$)
$d_2 \neq 0, d_4 \neq 0$	x dan y saling menentukan ($x \leftrightarrow y$)

Sims menganjurkan dalam penelitian empiris menggunakan 4 (empat) nilai akan datang dan 8 (delapan) nilai masa lampau untuk variabel-variabel bebas. Jika terjadi korelasi serial pada *error terms*, maka pengkoreksian hendaknya dilakukan.

3.3.3 Uji Statistik

Uji statistik atau uji signifikansi bertujuan untuk menguji berarti tidaknya suatu hipotesa nol (H_0). Keputusan untuk menerima atau menolak H_0 dibuat atas dasar nilai statistik (uji t dan uji F) yang diperoleh dari hasil perhitungan. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel pada derajat keyakinan tertentu.

Uji t bertujuan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan dalam uji t ini adalah (Sugiyanto, 1994:77-78):

$$H_0 : b_i = b \text{ dan}$$

$$H_a : b_i \neq b$$

Dimana : b_i adalah nilai parameter variabel bebas ke- i , sedangkan b adalah nilai statistik yang biasanya dianggap nol. Bila t -hitung lebih besar dari t -tabel maka H_0 ditolak, berarti pengaruh variabel bebas adalah nyata. Nilai t -hitung dapat diperoleh dengan cara:

$$t_{hitung} = (b_i - b) / S_{b_i}$$

dimana: S_{b_i} adalah simpangan baku variabel bebas ke- i .

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan atau serentak. Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 \dots b_n = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \dots b_n \neq 0$ (ada pengaruh)

Bila F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 ditolak, berarti ada pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan cara:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

dimana R^2 adalah koefisien determinasi, k adalah jumlah variabel bebas dan n adalah jumlah sampel.

3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pendekatannya

Definisi variabel operasional dalam hal ini bertujuan untuk menghindari pengertian yang meluas dan menyatukan kesamaan arti. Variabel tersebut adalah:

1. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum (bukan hanya satu macam barang saja dan tidak terjadi sesaat). Inflasi (kenaikan tingkat harga) dalam penelitian ini menggunakan data inflasi mulai tahun 1983.I sampai dengan 2000.IV menggunakan pendekatan indeks harga konsumen (IHK).

Indeks harga konsumen (IHK) merupakan hasil bagi antara indeks harga konsumen pada periode tertentu dikurangkan dengan indeks harga konsumen satu periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan indeks harga konsumen satu periode sebelumnya dan dikalikan 100. Definisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Insukindro,1993:139):

$$LI_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

LI_t = laju inflasi pada periode t

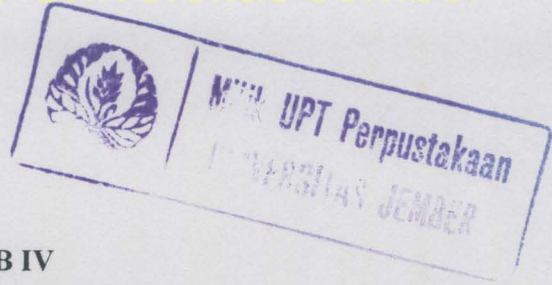
IHK_t = indeks harga konsumen periode t

IHK_{t-1} = indeks harga konsumen periode t-1

Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam menghitung inflasi karena data indeks harga konsumen dapat diperoleh dalam bentuk bulanan, triwulanan ataupun tahunan. Data indeks harga konsumen di Indonesia cukup mudah diperoleh baik dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia International Financial Statistics – International Monetary Fund (IFS-IMF) ataupun lembaga keuangan lainnya.

2. Kurs (*exchange rate*) adalah harga mata uang dalam negeri dibandingkan dengan mata uang asing, dalam hal ini Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Nilai mata uang Dollar Amerika Serikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai kurs *market rate* (aa) yaitu nilai tukar dari SDR (*special drawing right*) nasional diakhir periode dalam *International Financial Statistics – International Monetary Fund* (IFS-IMF).

SDR (*special drawing right*) merupakan uang resmi internasional yang permanen, dimana semua anggota IMF wajib untuk menerima SDR ini dalam transaksi dengan pemerintah-pemerintah lain dan bank sentral. Dengan kata lain SDR merupakan kewajiban sejenis uang dari IMF itu sendiri yang diberikan kepada pemerintah-pemerintah anggota pada proporsi tertentu dari sumbangan kuota mereka.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Perkembangan Inflasi di Indonesia

Sejak pemerintahan orde lama sampai memasuki orde baru, perekonomian Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang paling mencolok adalah tingkat inflasi yang mencapai hiperinflasi pada masa orde lama telah meninggalkan dampak sedemikian besarnya terhadap Indonesia sehingga berbagai aspek perekonomian dan kebijakan dewasa ini tidaklah mudah dipahami tanpa melihat kembali permasalahan yang terjadi selama dan sesudah tahun yang penuh gejolak pada dasawarsa enampuluhan.

Pada masa orla memang terlihat kebijakan pemerintah Indonesia lebih ditekankan pada masalah-masalah politik. Hal ini dapat dipahami karena memang pada masa itu kondisi stabilitas politik, sebagai faktor penting untuk terwujudnya pembangunan ekonomi, belum tercapai. Karena terabaikannya masalah-masalah perekonomian, yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah, dimana selama periode 1962-1966 kurang dari 2%, lebih rendah daripada kenaikan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan perkapita. Neraca pembayaran juga mengalami defisit anggaran pemerintah yang sebagian besar ditutup oleh bank sentral dengan pencetakan uang baru. Hal inilah yang menimbulkan hiperinflasi dan mencapai puncaknya pada tahun 1966 yang mencapai 635% (Nasution, 1991:28).

Situasi demikian dapat dibayangkan sangat sulit untuk melakukan usaha-usaha pembangunan yang sehat dan berkesinambungan. Menyadari hal ini pemerintahan Orba pada akhir tahun 1966 menjalankan kebijakan ekonomi yang memberi prioritas kearah **pencapaian stabilitas moneter**, yakni dengan melaksanakan program stabilisasi moneter, fiskal dan lalu lintas devisa.

Pada kebijakan fiskal terdapat program stabilisasi yang terdiri dari kebijakan anggaran belanja berimbang. Mengingat sukarnya dilakukan pengumpulan pajak dalam negeri dalam kondisi hiperinflasi, pemerintah pada permulaan program stabilisasi ekonomi terpaksa menggunakan bantuan luar negeri bagi pembiayaan sebagian besar pengeluarannya. Oleh karena penerimaan pajak yang rendah, sebagian bantuan luar negeri tersebut pada tahun 1967 digunakan juga untuk membiayai anggaran rutin, dan baru semenjak tahun 1968 bantuan luar negeri semata-mata digunakan untuk kegiatan pembangunan.

Disamping itu pemerintah mengurangi campur tangannya dalam bidang perekonomian dan memberikan kesempatan bagi pengusaha swasta untuk mengambil peranan lebih besar. Dalam hubungan ini, pengawasan devisa yang diberlakukan secara ketat selama ini, mulai akhir tahun 1966 secara berangsur-angsur dikurangi walaupun sistem yang dipergunakan masih melanjutkan sistem devisa multiple. Kelemahan sistem ini baru diatasi kemudian pada tahun 1970-1971, yaitu dengan menetapkan sistem kurs devisa tunggal dan menghapuskan sistem pengawasan devisa. Semenjak itu Indonesia berubah menjadi salah satu negara penganut sistem devisa lalu lintas yang bebas.

Program stabilisasi serta langkah-langkah pelengkap tersebut berhasil mengurangi tingkat inflasi dari 635% ditahun 1966 menjadi kurang dari 14% dalam tahun 1969. Pada tahun 1971 inflasi telah menurun lagi menjadi sebesar 4,6%. Kesungguhan usaha pemerintah untuk melakukan secara efektif program stabilisasi tersebut telah berhasil menghilangkan kecemasan akan terus berlangsungnya inflasi dan dengan demikian dapat dibuat iklim yang tenang dalam melakukan pembangunan ekonomi yang sehat dan berkesinambungan.

Suatu perekonomian yang kurang menggembirakan terjadi menjelang akhir Pelita I, yaitu munculnya kembali bahaya inflasi yang terutama disebabkan oleh membaiknya pasaran komoditi internasional dalam tahun 1973/1974 serta terjadi peningkatan kredit perbankan. Di tahun 1974 inflasi meningkat menjadi 41% sementara pertumbuhan kredit perbankan dalam tahun tersebut telah mencapai 60%.

Mengatasi laju inflasi yang demikian tinggi tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan anti inflasi dalam bentuk Paket Anti Inflasi 9 April 1974 yang menyangkut segi pengelolaan permintaan dan penawaran (*demand and supply management policy*). Di bidang pengelolaan permintaan, dilakukan beberapa kebijakan perkrditan luar negeri, kebijakan dana, kebijakn modal dan kebijakan anggaran belanja. Sedangkan dari segi penawaran dilakukan program cadangan nasional, kebijakn perdagangan dlam negeri dan program pengadaan pangan. Sebagai hasil dari kebijakan tersebut laju inflasi tahunan Indonesia secara bertahap turun drastis.

Pada perkembangan setelah Pelita I dan memasuki Pelita II secara umum telah mencapai sasarannya. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan PDB (harga konstan) yang rata-rata 7,2% setiap tahun. Pada tahun 1975 inflasi dapat ditekan menjadi 19,7% dan tahun 1977 menjadi 11,4% setahun.

Pada tahun 1979 inflasi kembali meningkat menjadi 21,77% dan pada tahun berikutnya menjafi 18%. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya harga minyak bumi, diambilnya tindakan devaluasi melalui Paket Kebijakan 15 Nopember 1978 (Knop15), naiknya harga dasar pembelian beras, meningkatnya inflasi dunia dan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak. Guna mengatasi gejolak harga yang cukup besar itu, diantaranya melalui pengendalian harga kebutuhan pokok (terutama beras) oleh badan Urusan Logistik (Bulog) dan melalui stabilisasi berupa pengurangan penggunaan rekeningnya pada Bank Indonesia. Arndt dan Sundrum, berpendapat bahwa kebijaksanaan devaluasi Nopember 1978 membawa akibat terjadinya *cost push inflation* (Arndt,1984:84).

Pada tahun 1985 laju inflasi Indonesia mencapai titik terendah yakni dibawah 5%. Meskipun kenyataan ini menimbulkan tanggapan yang agak konvertibel oleh sementara ahli ekonomi, karena rendahnya tingkat inflasi pada tahun tersebut mengindikasikan lesunya perekonomian Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Tingkat inflasi rata-rata yang ditunjukkan pada periode 1984-1992 adalah 7,36%. Laju inflasi tersebut masih digolongkan pada tingkat inflasi moderat, yaitu berkisar di bawah batas psikologis (10%) atau dikatakan masih berada pada tingkat stabilitas relatif (Glassburner dan Chandra,1984:91). Namun demikian pada tahun-tahun tertentu inflasi masih mengalami fluktuasi yang tajam, seperti pada tahun 1987 terjadi kenaikan 50% dari 5,8% pada tahun 1986 menjadi sebesar 9,2%. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan indeks makanan yang erat kaitannya dengan berkurangnya produksi akibat kemarau panjang. Selain itu juga karena pengaruh devaluasi September 1986 yang masih terasa.

Fluktuasi inflasi yang terjadi tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diluncurkan pemerintah untuk mempengaruhi iklim dunia usaha, seperti paket kebijakn deregulasi untuk merangsang pertumbuhan kebijakan uang ketat guna memberi kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tahun 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakn untuk menekan laju inflasi melalui upaya pengerahan dana masyarakat. *Tight Money Policy* (TMP) tahun 1990 lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I berupa peningkatan suku bunga SBI yang ditujukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar masih belum mampu menurunkan angka inflasi. Tahun 1991 pemerintah mengeluarkan kembali kebijakn gebrakan Sumarlin II berupa pengalihan deposito BUMN dan bank pemerintah menjadi SBI (Pangestu,1992:248).

Sementara itu laju inflasi pada tahun 1990 tercatat sebagai laju inflasi tertinggi dalam periode 1985-1993, dengan angka sebesar 12,5%. Tingginya laju inflasi pada tahun ini disebabkan oleh kenaikan permintaan investasi dan konsumsi yang sangat cepat melebihi kemampuan dalam negeri untuk menemuinya. Akibatnya pada tahun ini perekonomian memanas dan mengalami *overheating* (Mooy,1993).

Sebelum kesemuanya terjadi, segala tindakan melawan inflasi sebenarnya telah ditempuh, bahkan kebijakan uang telah berlangsung beberapa bulan sebelumnya. Dampak kebijakan tersebut tidak segera terlihat karena memerlukan tenggang waktu (*time lag*). Kebijakan uang ketat berangsur-angsur mampu mengerem laju inflasi sehingga pada tahun 1992 laju inflasi dapat ditekan sampai di bawah 5%.

Pada periode tahun 1994-1996 rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 7,9% yang berarti lebih tinggi dari sasaran rata-rata pertumbuhan ekonomi selama Repelita VI.

Memasuki tahun 1994 pemerintah mulai memberi perhatian lebih terhadap stabilitas ekonomi. Berdasarkan perspektif kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil tampak adanya kehati-hatian pemerintah yang lebih tinggi atas inflasi seperti kecenderungan terhadap stabilitas harga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi di Indonesia menunjukkan grafik menurun yaitu pada tahun 1994, 1995 dan 1996 masing-masing 9,24%, 8,64% dan 6,47%.

Tahun 1995 pelaksanaan pembangunan nasional mengalami masalah karena terjadi *external shock* yaitu apresiasi Yen, disamping kecenderungan peningkatan inflasi yang merupakan sinyal adanya kesulitan ekonomi yang berawal pada tahun 1995. Laju inflasi juga mengalami penurunan seiring dengan penyelenggaraan kebijakan moneter dan fiskal yang berhati-hati serta meningkatnya kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa. Di sisi eksternal, meskipun mengalami peningkatan defisit transaksi berjalan relatif cukup aman. Perkembangan yang cukup baik berlanjut hingga semester I 1997. Ekonomi Indonesia masih menunjukkan aktivitas yang tinggi yang diiringi dengan laju inflasi yang relatif rendah.

Meskipun semester II tahun 1997, perekonomian Indonesia mulai menghadapi tekanan yang berat sehubungan dengan mulai merebaknya krisis keuangan regional. Di dalam kondisi pasar keuangan domestik yang telah terintegrasi dengan pasar keuangan regional maupun global, perekonomian menjadi sensitif terhadap berbagai perkembangan di negara lain. Tekanan inflasi pun menjadi semakin kuat, dimana laju inflasi kumulatif mencapai 11,5% yang merupakan laju inflasi tertinggi sejak 1983.

Sejak tahun 1980 hingga 1998 tercatat sudah empat kali Indonesia menembus inflasi diatas satu digit, seperti pada tahun 1980 sebesar 15,97%, tahun 1983 sebesar 11,46%, tahun 1997 hampir menyamai tahun 1983 yaitu sebesar 11,05% dan tahun 1998 tingkat inflasi mencapai titik klimaks sebesar 77,63%. Namun dua kali pula mencatat angka inflasi dibawah lima persen yaitu pada tahun 1985 sebesar 4,31% dan

tahun 1992 sebesar 4,94%. Laju inflasi tahun kalender 1999 hingga Mei 1999 mencapai angka 3,08% dan laju inflasi tahun 2000 sebesar 6,6%.

Pada tahun 1998 tekanan inflasi semakin tinggi dengan lonjakan inflasi sebesar 77,03%. Hal ini disebabkan karena terjadinya kebocoran di sektor moneter sebagai akibat pemberian BLBI untuk mengatasi kepercayaan pada sistem perbankan dan adanya ekspansi uang beredar yang kuat terutama *bank rush* yang semakin meluas di bulan Januari 1998 sebagai akibat menurunnya kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Tekanan inflasi juga dikarenakan adanya fenomena *flight to currency* dan *flight to quality* serta adanya peningkatan spekulasi terhadap nilai tukar.

Pada triwulan ketiga tahun 1998 laju inflasi diwarnai pula oleh tekanan inflasi yang bersifat struktural. Tekanan struktural pertama adalah *energy price shock* yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tekanan struktural tersebut dikurangi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan proaktif untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sisi distribusi. Tampaknya kebijakan di sisi distribusi tersebut cukup berhasil terutama dalam kaitannya dengan distribusi beras. Selain tekanan struktural dinamika inflasi juga diwarnai oleh kuatnya tekanan *noise inflation*. *Noise inflation* memberi pengaruh yang besar terhadap inflasi sejak Januari 1998 karena kelangkaan pasokan barang-barang kebutuhan dan langkanya faktor *cost push*. Kelangkaan pasokan terjadi karena berkurangnya produksi barang manufaktur akibat pengurangan dan penghentian produksi serta akibat gejolak sosial. Faktor *cost push* berasal dari *imported inflation*, peningkatan biaya distribusi dan kenaikan suku bunga.

4.1.2 Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat

Sejak tahun 1978 Indonesia menganut dan mempertahankan sistem nilai tukar valuta asing mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*). Melalui kebijakan ini Bank Indonesia berusaha mencari keseimbangan dan mempertahankan daya saing rupiah terhadap sekeranjang mata uang asing (*basket of currency*). Dalam perkembangannya Dollar Amerika Serikat memiliki bobot terbesar dalam basket

tersebut sehingga nilai tukar rupiah lebih tergantung pada mata uang Dollar Amerika.

Perkembangan kurs Dollar Amerika Serikat terhadap rupiah mulai tahun 1988 sampai dengan tahun 2000 terus menguat. Menguatnya Dollar Amerika Serikat terhadap rupiah ini disebabkan permintaan terhadap Dollar Amerika Serikat terus meningkat, sementara cadangan devisa di bank sentral utamanya Dollar Amerika Serikat sangat terbatas jumlahnya. Permintaan Dollar Amerika Serikat meningkat disebabkan adanya kecenderungan impor yang dibiayai dengan Dollar Amerika Serikat terus mengalami peningkatan. Faktor lain penyebab menguatnya Dollar Amerika Serikat terhadap nilai rupiah adalah adanya unsur spekulasi dalam pasar. Spekulasi dengan motif untuk mencari keuntungan melalui jual beli uang dapat mempengaruhi kurs Dollar Amerika Serikat terhadap rupiah. Saat ini unsur spekulasi lebih besar pengaruhnya terhadap kurs Dollar Amerika Serikat.

Pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1992, Indonesia menggunakan sistem kurs *managed floating* II dimana unsur *floating* lebih dominan dibanding dengan unsur manajemen. Pada periode ini kekuatan pasar semakin besar dan unsur *floating* semakin urgen mengingat manajemen yang terlalu dominan dapat berakibat *misalignment* pada nilai tukar riil.

Tahun 1997 gejolak kurs mata uang menimpa Indonesia sehingga pemerintah melebarkan pita intervensi pada tanggal 12 Juli 1997 untuk menghadapi gejolak tersebut atau meminimalisasi ekspos negatif dari gejolak yang timbul. Bank Indonesia telah mengintervensi dengan menjual Dollar Amerika Serikat menggunakan cadangan devisa sekitar US\$ 1,5 milyar sejak tanggal 14 Agustus 1997 pemerintah menghapus pita intervensi dan rupiah diambangkan secara bebas.

Fleksibilitas nilai tukar rupiah semakin ditingkatkan melalui penerapan kebijakan nilai tukar *floating band* sejak tahun 1992 hingga Agustus 1997. Peningkatan fleksibilitas nilai tukar tersebut telah mendorong perkembangan pasar nilai tukar dalam negeri yang tercermin dari semakin berkurangnya ketergantungan bank-bank umum kepada Bank Indonesia dalam melakukan transaksi devisa.

Nilai tukar rupiah mengalami berbagai tekanan yang menyebabkan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terjadi sejak pertengahan tahun Juli 1997. Tekanan ini berasal dari *currency turmoil* yang melanda Thailand yang kemudian menyebar ke kawasan ASEAN sehubungan dengan karakteristik perekonomian yang mempunyai kemiripan. Tekanan depresiatif tersebut meningkat khususnya sejak awal Agustus 1997 dimana rupiah telah menembus angka Rp 2650,- per 1 US\$. Pada tanggal 14 Agustus 1997, pemerintah menghapus rentang intervensi dan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (*flexible exchange rate*). Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan spekulatif terhadap rupiah dan memantapkan kebijakan moneter dalam negeri. Pemerintah Indonesia juga melakukan intervensi nilai tukar karena bertujuan untuk menghilangkan distorsi-distorsi di pasar nilai tukar luar negeri mengingat pasar ini belum sempurna dan belum rasional.

Sistem *managed floating* dinilai kurang sesuai diterapkan karena dikhawatirkan akan menjadi sasaran serangan para spekulan dan saat itu Indonesia masih mempunyai beban hutang swasta yang pada saat itu diperkirakan sebesar USD 50 milyar. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Indonesia tidak lagi menggunakan sistem *managed floating* dan diganti dengan penerapan sistem nilai tukar *free floating* (Samiun, 1998:33).

Rupiah bergejolak tajam dan mengalami tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan valuta asing lainnya di kawasan Asia yang terjadi semenjak diberlakukannya penghapusan intervensi. Pada akhir maret 1998 nilai rupiah terhadap dollar terdepresiasi sekitar 70% dari Rp. 2530,- menjadi Rp. 8325,- per 1USD. Rupiah sempat merosot hingga titik terendah pada tanggal 22 Januari 1998 yaitu sekitar Rp. 16.000,- per 1 USD.

Pada tahun 1999 nilai tukar rupiah mulai agak stabil dibandingkan dengan tahun 1998 yang mencapai Rp. 8675,- per 1 USD. Rupiah menguat pada kuartal II tahun 1999 yaitu sebesar Rp. 6726,- dan pada tahun 2000 kuartal IV nilai tukar rupiah kembali melemah yaitu menjadi Rp. 9595,-. Nilai tukar rupiah terus mengalami

fluktuasi yang cukup tinggi. Adapun faktor pendorong yang mengakibatkan bergejolaknya nilai tukar rupiah tersebut adalah berasal dari fundamental mikroekonomi, sedangkan efek menular (*contagion effect*) dari nilai tukar Thailand hanya merupakan pemicu. Beberapa kelemahan faktor fundamental mikroekonomi tersebut adalah: 1) besarnya ketergantungan sektor swasta terhadap luar negeri, sehingga dalam enam tahun terakhir hutang luar negeri swasta meningkat sekitar 28,6% dibandingkan dengan hutang luar negeri pemerintah yang naik hanya 0,4% per tahun, 2) pertumbuhan ekspor yang lambat sebagai akibat rendahnya efisiensi sektor dunia usaha, 3) kerapuhan sektor keuangan khususnya sektor perbankan sebagai akibat pengelolaan usaha yang lemah dan kurang transparan. Ketiga faktor tersebut telah menyebabkan *capital outflow* akibat kurangnya kepercayaan investor asing terhadap kestabilan perekonomian Indonesia (Goeltom dan Zulverdi, 1998:78).

4.1.3 Sistem Nilai Tukar yang Pernah Diterapkan di Indonesia

Selama masa orde baru Indonesia menggunakan tiga macam sistem nilai tukar, antara lain sistem nilai tukar tetap (1970-1978), sistem nilai tukar mengambang terkendali (1978 – 14 Agustus 1997) dan sistem nilai tukar mengambang bebas (mulai 14 Agustus 1997). Masing-masing sistem nilai tukar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Nilai Tukar Tetap (1970-1978)

Indonesia menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan kurs resmi Rp. 250,- per satu Dollar Amerika Serikat (sebelumnya Rp. 45,- per satu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Undang-undang no. 32 tahun 1964. Sepanjang periode tersebut Indonesia menggunakan sistem kontrol devisa yang relatif ketat. Para eksportir diwajibkan menjual hasil devisanya kepada Bank Devisa untuk selanjutnya dijual kepada pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Namun demikian tidak terdapat pembatasan dalam hal kepemilikan, penjualan maupun pembelian valuta asing. Sebagai konsekuensi kewajiban penjualan devisa tersebut maka Bank Indonesia harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan valuta asing bank komersial

untuk memenuhi permintaan para importir maupun masyarakat yang membutuhkan valuta asing. Bank Indonesia dalam sistem nilai tukar tetap ini memiliki wewenang penuh mengawasi transaksi devisa. Sementara untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang telah ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Pada periode ini pemerintah melakukan devaluasi sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 17 April 1970 dengan kurs sebesar Rp. 37,- per Dollar Amerika Serikat; tanggal 23 Agustus 1971 dengan kurs sebesar Rp.415,- per Dollar Amerika Serikat dan pada tanggal 15 Nopember 1978 dengan kurs sebesar Rp.625,- per Dollar Amerika Serikat.

b. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (1978-14 Agustus 1997)

Pada sistem ini nilai tukar rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (*basket of currencies*) negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Pemerintah dalam hal ini menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Kestabilan nilai tukar dipertahankan oleh pemerintah dengan melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau batas bawah dari *spread*. Periode 1978 sampai dengan 1986 unsur manajemen lebih besar dari pada *floating*. Cukup kuatnya unsur manajemen ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang relatif belum berkembang, sehingga Bank Indonesia tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan nilai tukar sesuai dengan target yang diinginkan dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga daya saing produk ekspor.

Semakin terbukanya perekonomian nasional ditandai dengan besarnya capital inflow ke Indonesia serta semakin pesatnya perkembangan sektor keuangan dan dunia usaha maka kebijakan nilai tukar *managed floating* lebih ditekankan pada unsur *floatingnya*, sementara unsur pengendaliannya (*managed*) semakin kecil. Fleksibilitas nilai tukar semakin ditingkatkan guna mendorong perkembangan pasar valuta asing dalam negeri.

c. Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (sejak 14 Agustus 1997)

Mulai pertengahan Juli 1997 nilai tukar rupiah mengalami berbagai tekanan yang menyebabkan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Tekanan tersebut semakin meningkat khususnya sejak awal Agustus 1997, dimana rupiah telah menembus Rp.2650,- per satu Dollar Amerika Serikat. Maka pada 14 Agustus 1997 pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi dan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas.

Perkembangan selanjutnya pergerakan nilai tukar rupiah pada era mengambang bebas mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Fluaktuasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi tetapi juga oleh faktor-faktor non ekonomis. Antara lain besarnya ketergantungan sektor swasta terhadap sektor luar negeri, pertumbuhan ekspor yang lamban dan karena rendahnya efisiensi sektor dunia usaha, kerapuhan sektor keuangan khususnya sektor perbankan yang disebabkan karena berkurangnya kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Kausalitas Granger

Pada analisis kausalitas Granger merupakan aplikasi dari model autoregresif antara dua variabel dimana variabel bebas terdiri dari variabel beda kala dari variabel terikat dan variabel bebas yang lain. Jumlah beda kala (*time lag*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 dan 8. Pemilihan beda kala (*time lag*) sebanyak 4 dan 8 dengan alasan menyesuaikan jumlah sampel yang ada yaitu sebanyak 64 mulai tahun 1983.I sampai dengan 2000.IV. Namun pada hakikatnya pemilihan beda kala (*time lag*) pada uji kausalitas Granger tidak terdapat patokan yang baku dan dapat dicari derajat kebebasannya (*degree of freedom*) (Gujarati,1995:591).

Parameter yang digunakan dalam uji kausalitas Granger adalah nilai statistik dari b_j dan d_j . Apabila kurs menjadi variabel terikat maka b_j merupakan nilai statistik dari variabel inflasi. Begitu sebaliknya apabila inflasi sebagai variabel terikat maka d_j merupakan nilai statistik dari variabel kurs. Nilai t statistik b_j dan d_j yang signifikan mengindikasikan adanya hubungan dua arah antara variabel kurs dan inflasi. Jika hanya b_j atau d_j yang signifikan berarti terdapat hubungan searah antara keduanya dan apabila b_j maupun d_j tidak menunjukkan nilai t statistik yang signifikan maka kedua variabel tersebut berhubungan saling bebas.

4.2.2 Analisis Kausalitas Sims

Variabel-variabel yang akan diestimasi dalam uji kausalitas Sims terlebih dahulu harus mengalami proses transformasi dan koreksi sehingga menjadi seri data yang bersifat stationary. Transformasi tersebut dalam bentuk logaritma dan difilterkan dengan $(1 - 1,5L + 0,5625^2)$ dimana L adalah lag operator. Simbol dari variabel yang telah mengalami transformasi dan pemfilteran adalah LEXRT untuk variabel kurs dan CPIT untuk variabel inflasi. Beda kala (time lag) yang digunakan dalam metode Sims adalah 4 nilai yang akan datang dan 8 nilai masa lampau untuk variabel-variabel bebas. Apabila variabel kurs (LEXRT) menjadi variabel terikat maka d_2 merupakan koefisien dari variabel inflasi (CPIT) 4 nilai yang akan datang. Begitu sebaliknya apabila variabel inflasi (CPIT) menjadi variabel terikat maka d_4 merupakan koefisien dari variabel kurs (LEXRT).

Penilaian dari metode Sims ini adalah dengan melihat nilai t statistik dari koefisien d_2 dan d_4 yang dibandingkan dengan nilai t tabel. Apabila nilai t statistik dari d_2 dan d_4 sama dengan nol atau tidak signifikan, maka antara variabel kurs dan inflasi tidak terdapat hubungan dua arah. Namun apabila nilai t statistik d_2 atau d_4 signifikan secara statistik maka terdapat hubungan searah antara keduanya. Kedua variabel tersebut tidak terdapat hubungan dua arah (saling bebas) apabila nilai statistik d_2 dan d_4 menunjukkan nilai sama dengan nol atau lebih rendah dari t tabel.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini menganalisis hubungan kausalitas antara kurs dengan inflasi di Indonesia tahun 1983.I – 2000.IV yang menggunakan alat analisis kausalitas Granger dan Sims. Model kausalitas Granger dan Sim yang telah diturunkan dan dibahas dalam bab III dan hasil analisis estimasi akan dikemukakan dalam bab IV berikut. Estimasi model menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan program komputer Eviews 3 (*Quantitative Micro Software*). Program perhitungan uji statistik, uji ekonometrik dan perhitungan yang lain telah tersedia dalam program komputer *Quantitative Micro Software*. Hasil estimasi ini diharapkan mampu mendukung hipotesis yang telah diajukan.

4.3.1 Hasil Analisis Regresi Uji Kausalitas Granger (*Granger Test Causality*)

Berdasarkan hasil analisis uji kausalitas Granger pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa hubungan antara kurs terhadap inflasi Indonesia tahun 1983.I sampai dengan 2000.IV menunjukkan hubungan yang signifikan. Hal tersebut didukung oleh nilai t-hitung variabel kurs terhadap variabel inflasi pada beda kala 4 maupun 8 menunjukkan hasil yang signifikansi. Nilai t-hitung tersebut adalah $EXR(-1)=2,5125$; $EXR(-2)=3,4244$; $EXR(-3)=0,5479$; $EXR(-4)=7,3948$; $EXR(-5)=2,5314$; $EXR(-6) = 0,5328$; $EXR(-7)=0,5347$; $EXR(-8)=-0,7416$ dan pada beda kala ke-1,2,4 dan 5 kesemuanya lebih besar daripada nilai t tabel dengan $df= 64-16-1=47$ ($t_{40,0,05}=1,684$) pada derajat keyakinan 95%. Dengan demikian antara variabel kurs (EXR) terhadap inflasi (CPI) terjadi hubungan yang signifikan dan positif. Nilai signifikansi yang tinggi dari koefisien variabel kurs (EXR) terhadap inflasi (CPI) mengindikasikan bahwa b_j tidak sama dengan nol ($b_j \neq 0$). Artinya kurs berpengaruh nyata terhadap inflasi di Indonesia pada kurun waktu penelitian dan hal ini disebabkan karena kurs merupakan faktor *imported inflation* yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga dalam negeri. Begitupun juga hasil analisis kausalitas Granger dengan beda kala empat yang menghasilkan nilai t hitung $EXR(-1)=3,2208$; $EXR(-2)=3,4208$; $EXR(-3)=-0,2428$; $EXR(-4)=-6,6230$. Beda kala pertama dan kedua menunjukkan

nilai t hitung yang lebih besar daripada t tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kurs baik pada beda kala 8 maupun 4 menunjukkan pengaruh yang nyata dan positif terhadap variabel inflasi.

Demikian halnya dengan hasil analisis kausalitas Granger pada tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh lemah terhadap variabel nilai tukar pada beda kala 8. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung $CPI(-1)=0,6025$; $CPI(-2)=1,9358$; $CPI(-3)=1,9806$; $CPI(-4)=-0,7251$; $CPI(-5)=-1,6100$; $CPI(-6)=2,3468$; $CPI(-7)=-1,5026$ dan $CPI(-8)=0,9214$. Dari beda kala 8, hanya ada 3 beda kala yang mempunyai nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu pada beda kala ke 2 (1,9358), 3 (1,9806) dan 6 (2,3468). Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel kurs atau dengan kata lain $dj=0$. Tidak demikian halnya dengan hasil analisis kausalitas Granger pada beda kala empat yang menunjukkan nilai t hitung $CPI(-1)=2,0280$; $CPI(-2)=-4,7559$; $CPI(-3)=3,5044$ dan $CPI(-4)=-2,6119$. Beda kala ke-1 dan ke-3 menunjukkan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel atau $dj \neq 0$.

Tabel 4.1
Hasil Regresi Uji Kausalitas Granger :Kurs terhadap
Inflasi dengan Beda Kala 4 dan 8

Variabel Penjelas	Inflasi atas Beda Kala 4 Inflasi dan Beda Kala 4 Kurs		Inflasi atas Beda Kala 8 Inflasi dan Beda Kala 8 Kurs	
C	0,1264	(0,1144)	- 1,1656	(-0,9523)
CPI (-1)	0,3788	(3,7681)	0,6204	(4,1878)
CPI (-2)	-0,1725	(-1,5029)	- 0,3610	(-2,1132)
CPI (-3)	-0,0432	(-0,3485)	0,0949	(0,5486)
CPI (-4)	0,1251	(1,2964)	- 0,2523	(-1,5253)
CPI (-5)			0,4571	(3,3817)
CPI (-6)			- 0,7241	(-4,6281)
CPI (-7)			0,6385	(3,5752)
CPI (-8)			- 0,4401	(-3,4443)
EXR(-1)	0,0039	(3,2208)	0,0029	(2,5125)
EXR(-2)	0,0063	(3,4208)	0,0064	(3,4244)
EXR(-3)	-0,0004	(-0,2428)	0,0011	(0,5479)
EXR(-4)	-0,0095	(-6,6230)	-0,0153	(-7,3948)
EXR(-5)			0,0080	(2,5314)
EXR(-6)			-0,0018	(-0,5328)
EXR(-7)			0,0018	(0,5347)
EXR(-8)			-0,0018	(-0,7416)
R ²	= 0,8491		0,9149	
DW statistik	= 1,9552		1,9616	
F statistik	= 41,5019		31,5804	

Sumber: Lampiran 2 dan 4

Signifikan pada derajat keyakinan 95%: $t_{0,005;40} = 1,684$

() : t-hitung

Tabel 4.2
Hasil Regresi Uji Kausalitas Granger : Inflasi terhadap
Kurs dengan Beda Kala 4 dan 8

Variabel Penjelas	Kurs atas Beda Kala 4 Kurs dan Beda Kala 4 Inflasi		Kurs atas Beda Kala 8 Kurs dan Beda Kala 8 Inflasi	
C	53,9648	(0,4865)	92,4988	(0,6029)
EXR (-1)	1,1642	(9,4092)	1,2488	(8,3486)
EXR (-2)	-0,1035	(-0,5566)	-0,1207	(-0,5134)
EXR (-3)	-0,0465	(-0,2741)	-0,2343	(-0,9005)
EXR (-4)	-0,0408	(0,2832)	0,2890	(1,1155)
EXR (-5)			-0,3745	(-0,9374)
EXR (-6)			0,1997	(0,4572)
EXR (-7)			0,0388	(0,0879)
EXR (-8)			-0,0350	(-0,1107)
CPI (-1)	20,4681	(2,0280)	11,1877	(0,6025)
CPI (-2)	-54,8001	(-4,7559)	-41,4539	(-1,9358)
CPI (-3)	43,6306	(3,5044)	42,9514	(1,9806)
CPI (-4)	-25,3013	(9,6868)	-15,0347	(-0,7251)
CPI (-5)			-27,2793	(-0,6100)
CPI (-6)			46,0178	(2,3468)
CPI (-7)			-33,6357	(-1,5026)
CPI (-8)			14,7574	(0,9214)
R ²	= 0,9585		0,9609	
DW statistik	= 2,0021		2,0008	
F statistik	= 170,3003		72,1788	

Sumber: Lampiran 3 dan 5

Signifikan pada derajat keyakinan 95%: $t_{0,005;40} = 1,684$

() : t-hitung

Tabel 4.3
Kriteria Hasil Pengujian Koefisien Regresi antara
Kurs dan Inflasi

Beda Kala (Lag)	Inflasi atas Beda Kala Inflasi dan Kurs	Kurs atas Beda Kala Kurs dan Inflasi	Kriteria Regresi Hasil Pengujian
4	$b_j \neq 0$	$d_j \neq 0$	Terdapat kausalitas dua
8	$b_j \neq 0$	$d_j = 0$	arah antara kurs dan inflasi

Sumber: Lampiran 2-5 yang diolah dan Arief, 1993:152

Analisis hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara dua variabel merupakan runtun waktu atau time series jangka pendek. Penelitian yang menggunakan kausalitas antara dua variabel ekonomi dalam analisis ekonometrika bagaikan dua sisi keping mata uang. Kontribusi Granger tentang definisi kausalitas dalam konteks analisis waktu merupakan sumbangan yang besar terutama bagi teoritis dan praktisi ekonometrika. Konsep kausalitas Granger dikenal sebagai konsep kausalitas sejati atau konsep prediktabilitas dimana masa lalu dapat mempengaruhi masa kini tetapi masa kini tidak dapat mempengaruhi masa lalu (Dumairy,1987:4).

Variabel kurs dan inflasi di Indonesia tahun 1983.I sampai dengan 2000.IV menunjukkan hubungan kausalitas dua arah sehingga kebijakan pemerintah dalam mengatasi fluktuasi kurs juga harus mempertimbangkan fluktuasi tingkat harga (inflasi) yang tidak stabil.

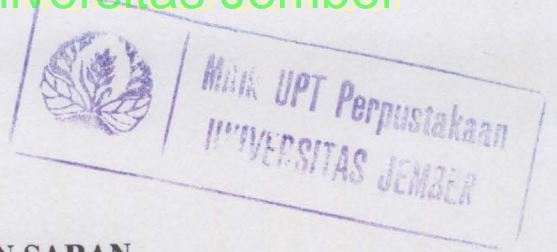
4.3.2 Hasil Analisis Regresi Uji Kausalitas Sims (*Sims Test Causality*)

Uji kausalitas hubungan antara kurs dan inflasi dalam hal ini akan diuji dengan metode Sims. Pengujian hubungan kausalitas antar dua variabel dengan menggunakan metode Sims pada dasarnya serupa dengan metode Granger. Perbedaannya terletak pada variabel terikat dan variabel bebas yang digunakan merupakan hasil dari transformasi dalam bentuk logaritma dan pemfilteran. Jadi variabel inflasi (CPI) sebagai variabel terikat yang telah ditransformasikan dalam bentuk logaritma dan difilterkan disini disimbolkan dengan CPIT dan variabel bebasnya meliputi variabel kurs periode t (LEXRT), variabel kurs dengan beda kala (*lag*) 8 [LEXRT(-1) sampai dengan LEXRT(-8)] dan variabel kurs 4 periode yang akan datang [LEXRT(1) sampai dengan LEXRT(4)]. Hasil analisis metode Sims menunjukkan bahwa koefisien variabel kurs 4 periode yang akan datang menghasilkan signifikansi yang rendah ($d2 = 0$). Hal ini berarti variabel kurs tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel inflasi secara signifikan. Pengujian ini juga didukung oleh uji koefisien (*wald test*), dimana dimisalkan variabel constanta, variabel kurs pada periode t (LEXRT) dan variabel kurs dengan beda kala 8 [LEXRT(-1) sampai dengan LEXRT(-8)] sama dengan nol, menghasilkan nilai F statistik yang lebih besar daripada F tabel yaitu $2,6150 > 2,00$ pada derajat keyakinan 95% ($F_{15;40} = 2,00$). Atau dengan kata lain nilai F hitung menunjukkan nilai yang berbeda dengan nol (tidak sama dengan nol). Artinya secara bersama-sama variabel kurs untuk 4 periode yang akan datang dapat berpengaruh terhadap variabel inflasi pada periode t , akan tetapi pengujian secara statistik menunjukkan signifikansi yang rendah.

Jika dibandingkan dengan hasil regresi dimana variabel kurs yang telah ditransformasikan dalam bentuk logaritma dan difilterkan (LEXRT) dengan variabel inflasi pada periode t (CPIT), inflasi dengan beda kala (*lag*) 8 [CPIT(-1) sampai dengan CPIT(-8)] dan variabel inflasi pada 4 periode yang akan datang [CPIT(1) sampai dengan CPIT(4)] juga menghasilkan signifikansi yang rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung yang lebih rendah daripada nilai t tabel ($d4=0$),

sehingga itu berarti variabel inflasi periode 1 sampai dengan 4 yang akan datang tidak berpengaruh terhadap variabel kurs ($d4=0$). Hasil uji koefisien (*wald test*), dimana dimisalkan variabel constanta, variabel inflasi pada periode t (CPIT) dan variabel inflasi dengan beda kala 8 [CPIT(-1) sampai dengan CPIT(-8)] sama dengan nol, menghasilkan nilai F statistik yang lebih besar daripada F tabel yaitu $464,5952 > 2,00$ pada derajat keyakinan 95% ($F_{15,40} = 2,00$). Atau dengan kata lain nilai F hitung menunjukkan nilai yang berbeda dengan nol (tidak sama dengan nol). Artinya secara bersama sama variabel inflasi untuk 4 periode yang akan datang dapat berpengaruh terhadap variabel kurs pada periode t , akan tetapi pengujian secara statistik menunjukkan signifikansi yang rendah.

Hasil uji kausalitas dengan menggunakan metode Sims telah memberikan jawaban yang berbeda dengan apa yang telah dibahas dalam hasil uji kausalitas Granger. Variabel kurs dan variabel inflasi mempunyai hubungan timbal balik atau dua arah. Sebaliknya menghasilkan hubungan yang saling bebas atau tidak terdapat hubungan dua arah antara kurs (EXR) dan inflasi (CPI) berdasarkan uji kausalitas metode Sims.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Studi empiris ini pada dasarnya adalah ingin mengetahui hubungan (kausalitas) antara inflasi dan kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat periode pengamatan 1983.I – 2000.IV. Uji kausalitas Granger dan Sims digunakan untuk mendukung maksud tersebut. Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger dan Sims, konklusi yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji kausalitas Granger antara variabel inflasi dengan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan lag 8 dan 4 sebagai kendala menunjukkan bahwa kedua variabel pengamatan mempunyai hubungan dua arah atau timbal balik.
2. Hasil uji kausalitas Sims antara variabel inflasi dengan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan 4 periode kedepan sebagai kendala menunjukkan bahwa kedua variabel pengamatan mempunyai hubungan saling bebas. Artinya antara variabel inflasi dan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat tidak saling berpengaruh satu sama lain.

Studi empiris ini hanya untuk melakukan pengujian dengan menerapkan metode Granger dan Sims untuk kasus di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa hal yang perlu mendapat catatan kritis dan juga merupakan keterbatasan studi ini adalah hasil yang didapat dengan menggunakan kedua metode tersebut menghasilkan kesimpulan yang berbeda dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut karena kemungkinan sampel yang digunakan atau penerapan metode ekonometrika yang kurang akurat (valid). Namun demikian harapan penulis, kesimpulan tersebut dapat menimbulkan respon positif dari peneliti selanjutnya dengan menggunakan metode ekonometri yang lebih akurat dan menghasilkan implikasi kebijakan yang lebih valid.

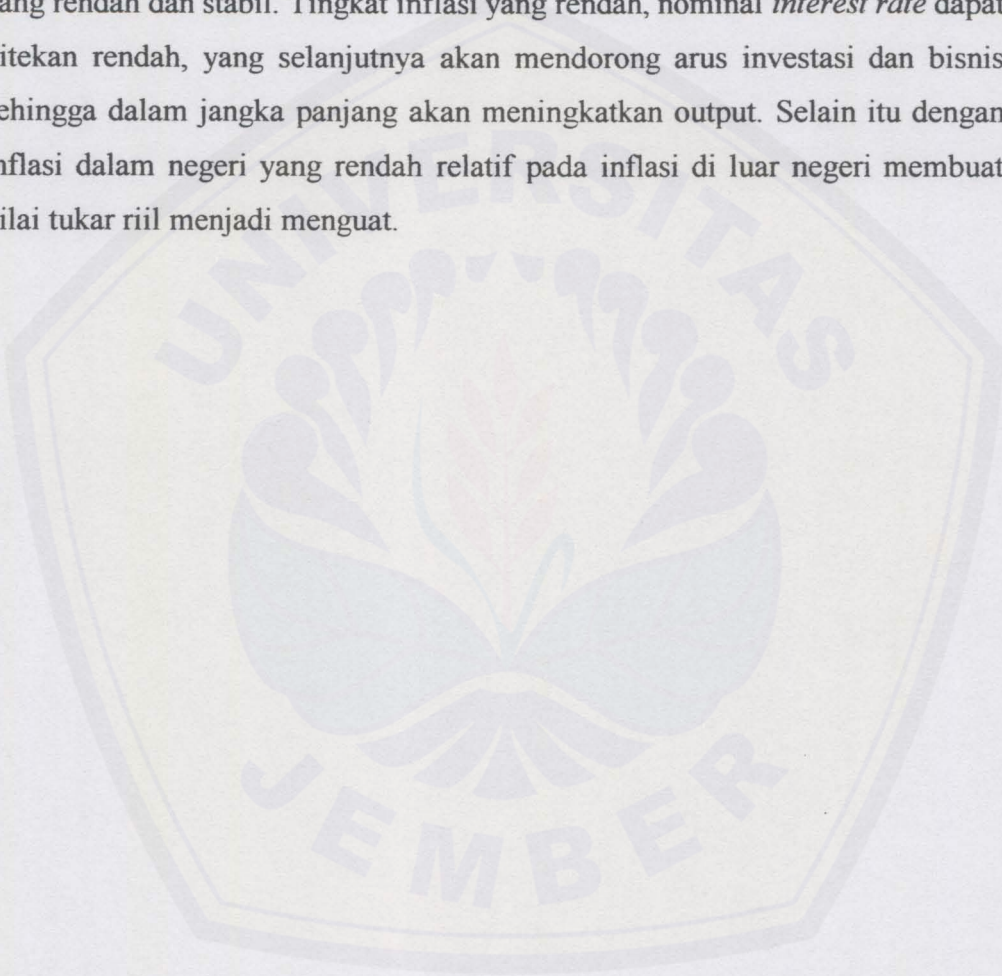
5.2 Saran

Analisis hubungan inflasi dan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sangat diperlukan agar dapat diketahui bagaimana perilaku kedua variabel tersebut yang saling mempengaruhi di Indonesia. Sehingga pada gilirannya akan memudahkan dalam menerapkan kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, untuk itu dukungan metode kausalitas yang tepat sangat diperlukan. Hasil penelitian tersebut memberikan implikasi kebijakan:

1. Stabilisasi nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat hendaknya terus diupayakan pada tingkat yang telah diprediksikan dalam penyusunan APBN yaitu dibawah angka 10.000/1 US\$. Dalam hal ini Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar uang dengan memasok Dollar agar jumlah Dollar di pasar uang tidak langka dan mengawasi pemborongan aksi Dollar yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin menggoyahkan perekonomian Indonesia (spekulan).
2. Kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) yang ditempuh oleh Bank Indonesia untuk menghambat meningkatnya tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah hendaknya tetap dijalankan dan terus diadakan evaluasi pada periode tertentu. Sebab kebijakan yang ditempuh guna mencapai inflasi yang cukup rendah memiliki arti penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan dampaknya secara minimal terhadap proses pemulihan perekonomian yang sedang berlangsung.
3. Kondisi perekonomian global maupun nasional yang sulit terprediksi memungkinkan *policy maker* dihadapkan pada pengambilan kebijakan yang dilematis. Dilema tersebut adalah apakah kebijakan moneter akan tetap mengikuti arah seperti yang telah direncanakan semula, ataukah perlu disesuaikan kembali untuk mendukung proses pemulihan ekonomi yang baru berjalan dengan mengorbankan pencapaian sasaran laju inflasi yang telah ditetapkan.

Sehingga dalam hal ini lebih tepat jika Bank Indonesia memilih menempuh kebijakan moneter yang diarahkan untuk menyerap kelebihan likuiditas agar tidak menambah tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar.

4. *Inflation targeting* merupakan *framework* kebijakan moneter yang perlu mendapat perhatian khusus karena inflasi yang terjadi dapat ditekan pada level yang rendah dan stabil. Tingkat inflasi yang rendah, nominal *interest rate* dapat ditekan rendah, yang selanjutnya akan mendorong arus investasi dan bisnis sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan output. Selain itu dengan inflasi dalam negeri yang rendah relatif pada inflasi di luar negeri membuat nilai tukar riil menjadi menguat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito, 1997, *Deregulasi Perdagangan dan Makro Indonesia: Aplikasi Model Keseimbangan Umum Terapan INDORANI*, PRISMA, No. 5. Th. XXVI. Mei-Juni, CESDA-LP3ES, Jakarta
- Abimanyu, Anggito, 2000, *Pesimisme Berlebihan: Krisis Multidimensional dan Pandangan Skeptis*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Arief, Sritua, 1993, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Arndt, H.W dan R.M. Sundrum, 1984, *Devaluation and Inflation*, Buletin of Indonesian Economic Studies, Vol. XX(1).
- Basri, Faisal, 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi, Peluang dan Kendala*, Erlangga, Jakarta.
- Boediono, 1984, *Teori Moneter: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, No. 5, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Classen, Emil-Maria, 1996, *Global Monetary Economics*, Oxford University Press, New York.
- Dawson, Graham, 1992, *Inflation and Unemployment: Causes Consequences and Cures*, Edward Elgar Publishing Company Old Post Road Brookfield, Vermont, USA.
- Frankel, J.A., 1978, *Purchasing Power Parity Doctrinal Perspectives and Evidence from the 1920s*, Journal of International Economics.
- Fidiyanto, Tito Wennur, 1999, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat di Indonesia tahun 1988.2-1997.2*, Skripsi, Fakultas Ekonomi-Universitas Jember, tidak dipublikasikan.
- Glassburner, Bruce dan Adityawan Chandra, 1984, *Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro*, LP3ES, Jakarta.
- Goeltom, Miranda S., 1997, *Sikap Bank Sentral dapat Dibaca Spekulan*, Merdeka, 11 Oktober.
- Goeltom, Miranda S dan Doddy Zulverdi, 1998, *Manajemen Nilai Tukar di Indonesia dan Permasalahannya*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1, No. 2, September.

- Gujarati, D.N, 1995, **Basic Econometrics**, Second Edition, McGraw-Hill, Singapore.
- International Monetary Fund, 1998, **International Financial Statistics Yearbook**, Washington DC, USA.
- Insukindro, 1993b, **Pengajaran Ekonomi Moneter di Indonesia: Aspek Teori dan Beberapa Isu Terkait**, Jurnal Ekonomi dan Industri, Edisi I, Th. I, PAU Studi Ekonomi, UGM.
- Jaya, Wihana K, 1996, **Kajian Isu Kontemporer Pembangunan Indonesia: Sekelumit Kajian Teoritis Overheating**, FE-PAU-MM, UGM, Yogyakarta.
- Lipsey, et. al, 1997, **Pengantar Ekonomi**, Edisi Kesepuluh, Terjemahan Agus Maulana, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Mooy, Adrianus, 1993, **Kebijaksanaan Moneter dan Perbankan dalam Perspektif Jangka Panjang**, Makalah Seminar HUT ke-33 FE-UGM, Yogyakarta.
- Nasution, Anwar, 1990, **Tinjauan Ekonomi atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia**, PAU-Ekonomi-UI, Gramedia, Jakarta.
- Nasution, Anwar, 1995, **Lalu Lintas Modal dan Kebijakan Moneter dalam Era Keterbukaan**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar IESP pada Fakultas Ekonomi-UI, 10 Agustus 1995.
- Nopirin, 1996, **Ekonomi Moneter**, Edisi 1 Buku II, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Nurridha, Youpi Shofyan, 1998, **Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Kurs Valuta Asing terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia tahun 1983-1997**, Skripsi, Fakultas Ekonomi-Universitas Jember, tidak dipublikasikan.
- Nusantara, Agung, 1999, **Uang dan Inflasi: Cointegrating Vector, Error Correction and Granger Causality**, Majalah Ilmiah Dua Bulanan, Edisi XXXI No.1 Pebruari, STIE-STIKUBANK, Semarang.
- Pangestu, Mari.E., 1992, **Strategi Kebijakan Ekspor Indonesia: Mencari Bentuk Indonesia Inc**, Prisma, No. IX.
- Qorih, Ciplis Gema, 2000, **Studi Komparatif Inersia Inflasi di ASEAN: Pendekatan Model Dinamis**, Skripsi, Fakultas Ekonomi-Universitas Jember, tidak dipublikasikan.

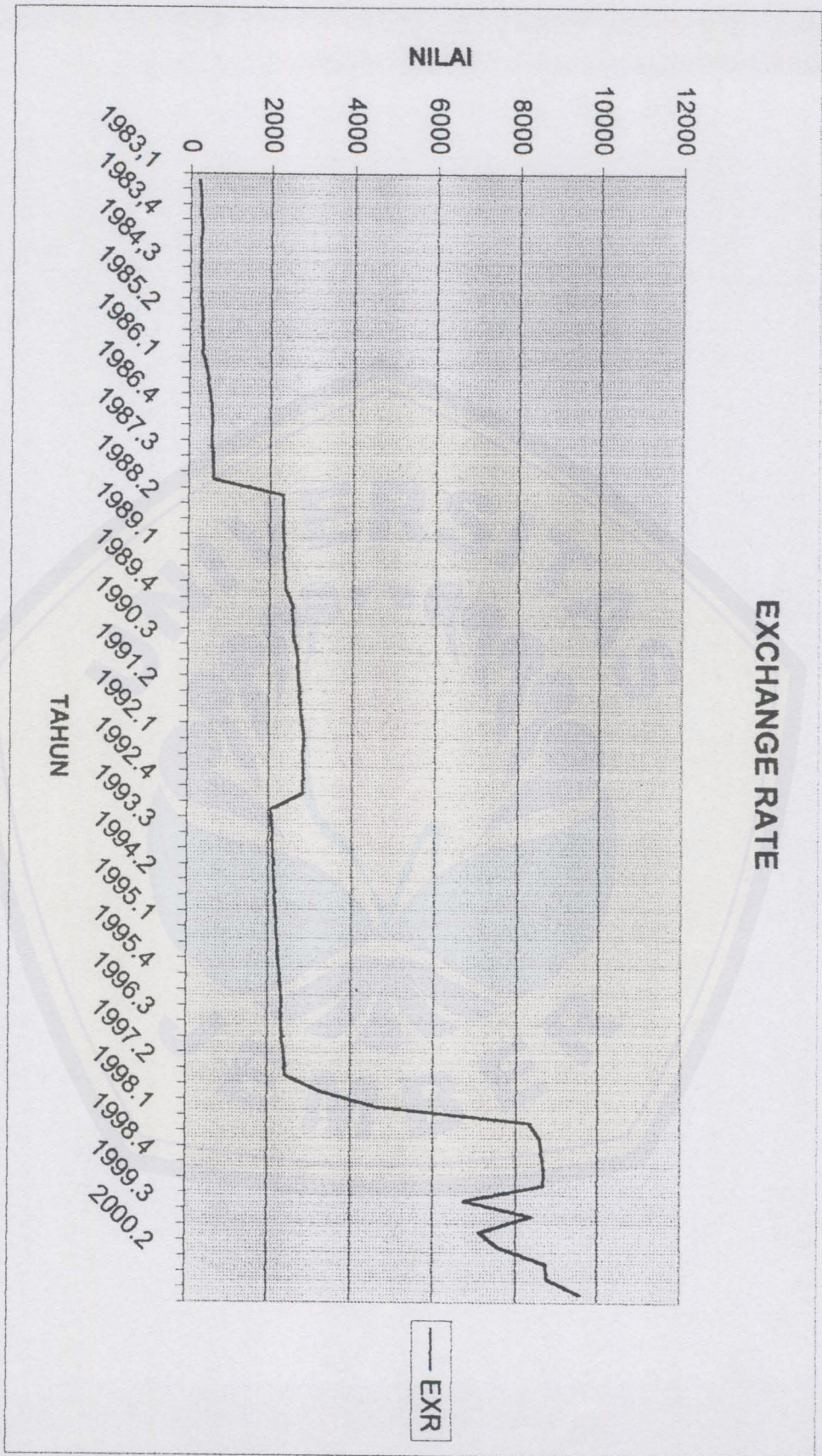
- Quantitative Micro Software, *Eviews 3*, 1994, Irvine CA, USA.
- Santoso, Wijoyo dan Reza Anglingkusumo, 1998, *Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel*, Buletin Moneter Ekonomi dan Perbankan Bank Indonesia, Jakarta.
- Senopati, I Dewa Ketut Yudha, 1995, *Kecepatan Penyesuaian Tingkat Inflasi dalam Kaitan dengan Implementasi Kebijakan Moneter di Indonesia (Studi Tentang Inersia)*, Tesis S2 UGM, tidak dipublikasikan.
- Sinungan, Muchdarsyah, 1991, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 1981, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Bina Grafika FE-UI, Jakarta.
- Sugiyanto, Catur, 1994, *Ekonometrika Terapan*, Edisi Pertama, BPFE-UGM, Yogyakarta
- Suryani, Ita, 1999, *Pengaruh Inflasi, Tingkat Bunga dan Produk Domestik Bruto terhadap Nilai Tukar Dollar Amerika Serikat di Indonesia tahun 1992-1997*, Skripsi, Fakultas Ekonomi-Universitas Jember, tidak dipublikasikan.
- Tambunan, T.H. Tulus, 1998, *Krisis Ekonomi Indonesia: Penyebab dan Penanggulangannya*, LP3E, Kadin Indonesia, Juli.
- Waluyo, Doddy Budi dan Benny Siswanto, 1998, *Peranan Kebijakan Nilai Tukar dalam Era Deregulasi dan Globalisasi*, Buletin Moneter Ekonomi dan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta.
- Wardhono, Adhitya dan Murti Lestari, 1998, *Aplikasi Model Backward dan Forward Looking untuk Penentuan Inflasi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Juli.

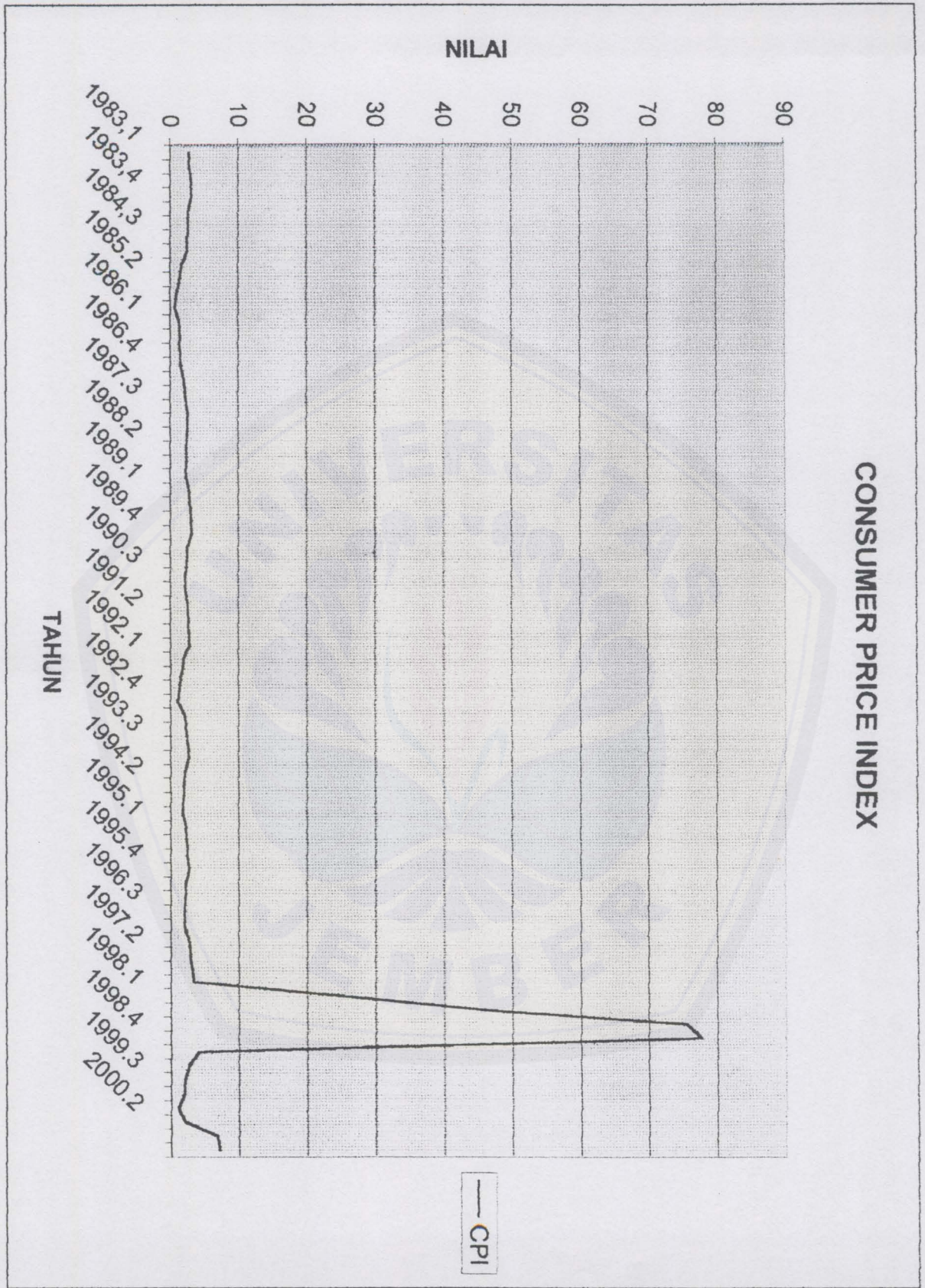
Lampiran 1: Data Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat (EXR) dan Inflasi (CPI) Tahun 1983.1-2000.4

TAHUN	EXR (Rp/1US\$)	CPI (%)
1983.1	234,22	2,734
1983.2	251,52	2,878
1983.3	268,82	3,021
1983.4	286,12	3,165
1984.1	262,05	2,747
1984.2	262,80	2,665
1984.3	263,55	2,584
1984.4	264,30	2,503
1985.1	291,77	1,718
1985.2	303,20	1,356
1985.3	314,64	0,994
1985.4	326,08	0,631
1986.1	429,49	1,347
1986.2	477,71	1,415
1986.3	525,94	1,484
1986.4	574,16	1,553
1987.1	553,93	1,997
1987.2	574,78	2,215
1987.3	595,62	2,434
1987.4	616,46	2,653
1988.1	2329	2,53
1988.2	2335	2,47
1988.3	2340	2,42
1988.4	2352	2,36
1989.1	2361	2,78
1989.2	2378	2,91
1989.3	2410	3,04
1989.4	2567	3,17
1990.1	2587	2,6
1990.2	2596	2,45
1990.3	2688	2,3
1990.4	2704	2,15
1991.1	2726	2,58
1991.2	2758	2,66
1991.3	2778	2,74
1991.4	2849	2,82

Lanjutan:

TAHUN	EXR (Rp/1US\$)	CPI (%)
1992.1	2847	1,96
1992.2	2842	1,67
1992.3	2839	1,38
1992.4	2835	1,08
1993.1	2071	2,08
1993.2	2088	2,31
1993.3	2108	2,54
1993.4	2110	2,76
1994.1	2144	2,13
1994.2	2160	2,01
1994.3	2181	1,89
1994.4	2200	1,77
1995.1	2219	2,28
1995.2	2246	2,41
1995.3	2276	2,54
1995.4	2308	2,67
1996.1	2338	2,25
1996.2	2342	2,17
1996.3	2340	2,08
1996.4	2383	1,99
1997.1	2419	2,67
1997.2	2450	2,89
1997.3	3275	3,11
1997.4	4650	3,33
1998.1	8325	25,13
1998.2	8575	46,55
1998.3	8635	75,47
1998.4	8680	77,63
1999.1	8685	4,08
1999.2	6726	2,73
1999.3	8386	2,02
1999.4	7100	2,01
2000.1	7590	1,1
2000.2	8735	2,1
2000.3	8780	6,8
2000.4	9595	7,11





**UJI KAUSALITAS GRANGER LAG 8
CPI TERHADAP EXR**

Dependent Variable: EXR

Method: Least Squares

Date: 02/01/02 Time: 17:49

Sample(adjusted): 1985:1 2000:4

Included observations: 64 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	92.49885	153.4088	0.602957	0.5494
EXR(-1)	1.248874	0.149591	8.348617	0.0000
EXR(-2)	-0.120762	0.235202	-0.513440	0.6100
EXR(-3)	-0.234287	0.260165	-0.900534	0.3724
EXR(-4)	0.289065	0.259131	1.115517	0.2703
EXR(-5)	-0.374552	0.399547	-0.937443	0.3533
EXR(-6)	0.199771	0.436897	0.457250	0.6496
EXR(-7)	0.038849	0.441583	0.087977	0.9303
EXR(-8)	-0.035032	0.316269	-0.110767	0.9123
CPI(-1)	11.18773	18.56681	0.602566	0.5497
CPI(-2)	-41.45397	21.41458	-1.935783	0.0589
CPI(-3)	42.95143	21.68604	1.980602	0.0535
CPI(-4)	-15.03476	20.73470	-0.725101	0.4720
CPI(-5)	-27.27930	16.94343	-1.610023	0.1141
CPI(-6)	46.01788	19.60884	2.346792	0.0232
CPI(-7)	-33.63569	22.38416	-1.502656	0.1396
CPI(-8)	14.75740	16.01590	0.921422	0.3615
R-squared	0.960894	Mean dependent var		3216.012
Adjusted R-squared	0.947581	S.D. dependent var		2636.321
S.E. of regression	603.5891	Akaike info criterion		15.86618
Sum squared resid	17123032	Schwarz criterion		16.43963
Log likelihood	-490.7177	F-statistic		72.17880
Durbin-Watson stat	2.000794	Prob(F-statistic)		0.000000

**UJI KAUSALITAS GRANGER LAG 4
CPI TERHADAP EXR**

Dependent Variable: EXR

Method: Least Squares

Date: 02/01/02 Time: 17:52

Sample(adjusted): 1984:1 2000:4

Included observations: 68 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.96487	110.9162	0.486537	0.6284
EXR(-1)	1.164216	0.123732	9.409208	0.0000
EXR(-2)	-0.103550	0.186037	-0.556609	0.5799
EXR(-3)	-0.046555	0.169812	-0.274155	0.7849
EXR(-4)	0.040813	0.144115	0.283199	0.7780
CPI(-1)	20.46810	10.09270	2.028011	0.0471
CPI(-2)	-54.80018	11.52244	-4.755955	0.0000
CPI(-3)	43.63058	12.45013	3.504429	0.0009
CPI(-4)	-25.30133	9.686880	-2.611917	0.0114
R-squared	0.958492	Mean dependent var	3042.316	
Adjusted R-squared	0.952863	S.D. dependent var	2650.506	
S.E. of regression	575.4501	Akaike info criterion	15.67092	
Sum squared resid	19537423	Schwarz criterion	15.96468	
Log likelihood	-523.8112	F-statistic	170.3003	
Durbin-Watson stat	2.002121	Prob(F-statistic)	0.000000	

**UJI KAUSALITAS GRANGER LAG 8
EXR TERHADAP CPI**

Dependent Variable: CPI

Method: Least Squares

Date: 02/01/02 Time: 17:45

Sample(adjusted): 1985:1 2000:4

Included observations: 64 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.165615	1.224009	-0.952293	0.3458
CPI(-1)	0.620382	0.148140	4.187815	0.0001
CPI(-2)	-0.361068	0.170861	-2.113223	0.0399
CPI(-3)	0.094931	0.173027	0.548648	0.5858
CPI(-4)	-0.252338	0.165437	-1.525285	0.1339
CPI(-5)	0.457171	0.135187	3.381761	0.0015
CPI(-6)	-0.724086	0.156454	-4.628111	0.0000
CPI(-7)	0.638529	0.178597	3.575244	0.0008
CPI(-8)	-0.440133	0.127787	-3.444280	0.0012
EXR(-1)	0.002999	0.001194	2.512575	0.0155
EXR(-2)	0.006426	0.001877	3.424414	0.0013
EXR(-3)	0.001137	0.002076	0.547909	0.5863
EXR(-4)	-0.015289	0.002068	-7.394815	0.0000
EXR(-5)	0.008070	0.003188	2.531451	0.0148
EXR(-6)	-0.001858	0.003486	-0.532883	0.5966
EXR(-7)	0.001884	0.003523	0.534772	0.5953
EXR(-8)	-0.001871	0.002523	-0.741642	0.4620
R-squared	0.914899	Mean dependent var	5.757500	
Adjusted R-squared	0.885929	S.D. dependent var	14.25896	
S.E. of regression	4.815880	Akaike info criterion	6.204229	
Sum squared resid	1090.057	Schwarz criterion	6.777682	
Log likelihood	-181.5353	F-statistic	31.58044	
Durbin-Watson stat	1.961639	Prob(F-statistic)	0.000000	

UJI KAUSALITAS GRANGER LAG 4
EXR TERHADAP CPI

Dependent Variable: CPI

Method: Least Squares

Date: 02/01/02 Time: 17:51

Sample(adjusted): 1984:1 2000:4

Included observations: 68 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.126371	1.104775	0.114386	0.9093
CPI(-1)	0.378799	0.100528	3.768104	0.0004
CPI(-2)	-0.172488	0.114769	-1.502922	0.1382
CPI(-3)	-0.043226	0.124009	-0.348574	0.7287
CPI(-4)	0.125088	0.096486	1.296446	0.1999
EXR(-1)	0.003969	0.001232	3.220858	0.0021
EXR(-2)	0.006339	0.001853	3.420846	0.0011
EXR(-3)	-0.000411	0.001691	-0.242813	0.8090
EXR(-4)	-0.009507	0.001435	-6.623000	0.0000
R-squared	0.849111	Mean dependent var	5.573235	
Adjusted R-squared	0.828651	S.D. dependent var	13.84671	
S.E. of regression	5.731743	Akaike info criterion	6.452652	
Sum squared resid	1938.320	Schwarz criterion	6.746410	
Log likelihood	-210.3902	F-statistic	41.50198	
Durbin-Watson stat	1.955213	Prob(F-statistic)	0.000000	

UJI SIMS
LEXRT TERHADAP CPIT

Dependent Variable: CPIT				
Method: Least Squares				
Date: 01/21/02 Time: 09:23				
Sample(adjusted): 1985:1 1999:4				
Included observations: 60 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1121.508	424.0993	-2.644446	0.0112
LEXRT	2.698346	11.90438	0.226668	0.8217
LEXRT(-1)	4.654444	11.92897	0.390180	0.6982
LEXRT(-2)	11.16389	12.14769	0.919013	0.3629
LEXRT(-3)	6.398328	12.44854	0.513982	0.6097
LEXRT(-4)	-13.25527	12.56536	-1.054906	0.2970
LEXRT(-5)	-8.462473	12.57190	-0.673126	0.5042
LEXRT(-6)	-5.742932	12.56721	-0.456978	0.6498
LEXRT(-7)	0.378466	12.55698	0.030140	0.9761
LEXRT(-8)	3.570720	8.545766	0.417835	0.6780
LEXRT(1)	7.656231	11.93354	0.641573	0.5243
LEXRT(2)	-5.246682	11.90508	-0.440710	0.6615
LEXRT(3)	3.858461	11.89487	0.324380	0.7471
LEXRT(4)	-1.433871	8.454721	-0.169594	0.8661
R-squared	0.412487	Mean dependent var	146.4042	
Adjusted R-squared	0.246451	S.D. dependent var	367.8046	
S.E. of regression	319.2808	Akaike info criterion	14.57098	
Sum squared resid	4689252.	Schwarz criterion	15.05966	
Log likelihood	-423.1295	F-statistic	2.484323	
Durbin-Watson stat	0.756189	Prob(F-statistic)	0.011716	

UJI SIMS CPIT TERHADAP LEXRT

Dependent Variable: LEXRT				
Method: Least Squares				
Date: 01/21/02 Time: 09:25				
Sample(adjusted): 1985:1 1999:4				
Included observations: 60 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	183.2312	10.48322	17.47851	0.0000
CPIT	0.013791	0.059030	0.233629	0.8163
CPIT(-1)	-0.019770	0.076984	-0.256810	0.7985
CPIT(-2)	0.023187	0.094692	0.244864	0.8077
CPIT(-3)	0.043896	0.123309	0.355987	0.7235
CPIT(-4)	-0.020467	0.254193	-0.080516	0.9362
CPIT(-5)	-0.117097	0.339373	-0.345038	0.7316
CPIT(-6)	0.224514	0.483178	0.464661	0.6444
CPIT(-7)	0.080331	0.511757	0.156972	0.8760
CPIT(-8)	-0.239309	0.355707	-0.672770	0.5045
CPIT(1)	0.013126	0.040160	0.326839	0.7453
CPIT(2)	0.009002	0.028788	0.312679	0.7559
CPIT(3)	0.000609	0.023677	0.025721	0.9796
CPIT(4)	0.006974	0.013443	0.518773	0.6064
R-squared	0.451311	Mean dependent var	190.7982	
Adjusted R-squared	0.296246	S.D. dependent var	22.12001	
S.E. of regression	18.55648	Akaike info criterion	8.880479	
Sum squared resid	15839.78	Schwarz criterion	9.369159	
Log likelihood	-252.4144	F-statistic	2.910473	
Durbin-Watson stat	0.116858	Prob(F-statistic)	0.003771	

UJI KOEFISIEN (WALD TEST) LEXRT TERHADAP CPIT

Wald Test:

Equation: Untitled

Null Hypothesis: C(1)=0
C(2)=0
C(3)=0
C(4)=0
C(5)=0
C(6)=0
C(7)=0
C(8)=0
C(9)=0
C(10)=0

F-statistic	2.615072	Probability	0.013181
Chi-square	26.15072	Probability	0.003543

UJI KOEFISIEN (WALD TEST) CPIT TERHADAP LEXRT

Wald Test:

Equation: Untitled

Null Hypothesis: C(1)=0
C(2)=0
C(3)=0
C(4)=0
C(5)=0
C(6)=0
C(7)=0
C(8)=0
C(9)=0
C(10)=0

F-statistic	464.5952	Probability	0.000000
Chi-square	4645.952	Probability	0.000000



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER